

INDIKATOR PASARTENAGAKERJA

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

AGUSTUS 2015





INDIKATOR PASAR TENAGA KERJA

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN



AGUSTUS 2015

INDIKATOR PASAR TENAGA KERJA KALIMANTAN SELATAN AGUSTUS 2015

ISBN : 978-602-0934-48-8
No. Publikasi : 63520.16.02
No Katalog : 2302005.63
Ukuran Buku : 21 cm x 29,7 cm
Jumlah Halaman : xii + 60 halaman

Naskah :
Bidang Statistik Sosial

Gambar Kulit
Bidang Statistik Sosial

Diterbitkan oleh :
© Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan

Dicetak oleh:
CV. Karya Bintang Musim

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

KATA PENGANTAR

Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) selama periode Februari 2011-Agustus 2014 dilaksanakan secara triwulanan, dan sejak Februari 2015 dilaksanakan secara semesteran. Survei ini mencakup seluruh wilayah Indonesia dan diharapkan dapat memonitor dinamika ketenagakerjaan secara teratur dan berkesinambungan. Sakernas Februari menghasilkan angka estimasi sampai dengan level provinsi, sedangkan Sakernas Agustus mampu menyajikan angka estimasi hingga tingkat kabupaten/kota.

Publikasi ini menyajikan series *Key Indicators of the Labour Market* (KILM) Provinsi Kalimantan Selatan keadaan Agustus 2013, Agustus 2014 dan Agustus 2015. Indikator-indikator yang ditampilkan mengacu pada KILM yang direkomendasikan ILO (*International Labour Organization*). Penerbitan publikasi ini bertujuan untuk memberikan gambaran kondisi pasar tenaga kerja di Kalimantan Selatan. Pembahasan dalam publikasi ini menyajikan 12 KILM dari 20 KILM yang direkomendasikan ILO.

Kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan publikasi ini, disampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih. Kritik dan saran dari pengguna sangat diharapkan untuk perbaikan publikasi edisi selanjutnya

Banjarmasin, Juni 2016

Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Kalimantan Selatan



Ir. Diah Utami, M.Sc

DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN

AK	Angkatan Kerja
BAK	Bukan Angkatan Kerja
BPS	Badan Pusat Statistik
EPR	<i>Employment-to-Population Ratio</i>
ICLS	<i>The International Conference of Labour Statisticians</i>
ILO	<i>International Labour Organization</i>
ISCED	<i>International Standard Classification of Education</i>
ISIC	<i>International Standard Industrial Classification</i>
KBLI	Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
KILM	<i>Key Indicators of the Labour Market</i>
MDG's	<i>Millenium Development Goals</i>
OECD	<i>Organisation for Economic Co-Operation and Development</i>
Sakernas	Survei Angkatan Kerja Nasional
SP	Sensus Penduduk
STP	Setengah Penganggur
Supas	Survei Penduduk Antar Sensus
TPT	Tingkat Pengangguran Terbuka
TPAK	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

DAFTAR ISI

BAB I.	PENDAHULUAN	1
1.1.	SAKERNAS DAN ANALISIS KETENAGAKERJAAN	1
1.2.	SAKERNAS DAN KILM	2
1.3.	PERAN KILM DI BIDANG KETENAGAKERJAAN	4
1.4.	ANALISIS PASAR TENAGA KERJA MENGUNAKAN KILM	6
BAB II.	PARTISIPASI DAN INDIKATOR TENAGA KERJA.....	9
KILM 1.	TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA.....	9
KILM 2.	RASIO PENDUDUK BEKERJA TERHADAP JUMLAH PENDUDUK (<i>EMPLOYMENT TO POPULATION RATIO - EPR</i>).....	11
KILM 3.	PENDUDUK BEKERJA MENURUT STATUS PEKERJAAN UTAMA	14
KILM 4.	PENDUDUK YANG BEKERJA MENURUT LAPANGAN USAHA.....	16
KILM 5.	PEKERJA PARUH WAKTU	17
KILM 6.	PENDUDUK YANG BEKERJA MENURUT JUMLAH JAM KERJA	21
BAB III.	INDIKATOR PENGANGGURAN	25
KILM 8.	PENGANGGURAN	25
KILM 9.	PENGANGGURAN PADA KELOMPOK UMUR MUDA	27
KILM 11.	PENGANGGURAN DAN PENDIDIKAN	30
KILM 12.	SETENGAH PENGANGGUR (<i>UNDEREMPLOYMENT</i>)	34
KILM 13.	TINGKAT KETIDAKAKTIFAN	37
BAB IV.	INDIKATOR PENDIDIKAN DAN MELEK HURUF.....	41
KILM 14.	PENCAPAIAN PENDIDIKAN DAN MELEK HURUF	41
	PENJELASAN TEKNIS.....	45

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama, Agustus 2013 – 2015	14
Tabel 2.	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama, Agustus 2013 – 2015	16
Tabel 3.	Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen), Agustus 2013 – 2015	25
Tabel 4.	Rasio TPT Penduduk Muda Terhadap TPT Dewasa (Persen), Agustus 2013 – 2015.....	28
Tabel 5.	Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Tingkat Pendidikan (Persen), Agustus 2013 – 2015.....	32
Tabel 6.	Jumlah Setengah Pengangguran, Agustus 2013 – 2015 (Ribu Jiwa)	34

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.	Jumlah Angkatan Kerja dan TPAK, Agustus 2013-2015	9
Grafik 2.	TPAK menurut Jenis Kelamin, Agustus 2013-2015	9
Grafik 3.	TPAK Menurut Kelompok Umur (Persen), Agustus 2014-2015	10
Grafik 4.	TPAK Menurut Kabupaten/Kota (Persen), Agustus 2015	10
Grafik 5.	<i>Employment to Population Ratio</i> , Agustus 2013-2015	11
Grafik 6.	<i>EPR</i> Menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal, Agustus 2013-2015	11
Grafik 7.	<i>EPR</i> Menurut Kelompok Umur, Agustus 2013-2015	12
Grafik 8.	<i>Employment to Population Ratio</i> Menurut Kelompok Umur, Agustus 2014 – 2015	13
Grafik 9.	<i>EPR</i> Menurut Kabupaten/Kota, Agustus 2015	13
Grafik 10.	Persentase Pekerja Rentan, Agustus 2013-2015	15
Grafik 11.	Persentase Pekerja Rentan Menurut Jenis Kelamin, Agustus 2015	15
Grafik 12.	Persentase Pekerja Rentan Menurut Kabupaten/Kota, Agustus 2015	15
Grafik 13.	Persentase Penduduk Bekerja Menurut Kabupaten/Kota dan Lapangan Pekerjaan Utama, Agustus 2015	17
Grafik 14.	Tingkat Pekerja Paruh Waktu (persen), Agustus 2013-2015	18
Grafik 15.	Tingkat Pekerja Paruh Waktu Menurut Jenis Kelamin (Persen), Agustus 2013-2015	18
Grafik 16.	Tingkat Pekerja Paruh Waktu Menurut Klaifikasi Wilayah (Persen), Agustus 2013-2015	19
Grafik 17.	Tingkat Pekerja Paruh Waktu Menurut Kabupaten/Kota (persen), Agustus 2015	19
Grafik 18.	Share Perempuan pada Pekerja Paruh Waktu (persen), Agustus 2013-2015	20
Grafik 19.	Share Perempuan pada Pekerja Paruh Waktu Menurut Kabupaten/Kota (Persen), Agustus 2015	20
Grafik 20.	Persentase Penduduk Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja, Agustus 2013-2015	21
Grafik 21.	Persentase Penduduk Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja dan Jenis Kelamin, Agustus 2013-2015	21
Grafik 22.	Persentase Penduduk Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja dan Daerah Tempat Tinggal, Agustus 2013-2015	22

Grafik 23.	Persentase Penduduk Bekerja Menurut Kabupaten/Kota dan Jumlah Jam Kerja, Agustus 2015	23
Grafik 24.	Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota (Persen), Agustus 2015	26
Grafik 25.	TPT Penduduk Umur Muda (persen), Agustus 2013-2015.....	27
Grafik 26.	TPT Penduduk Umur Muda Menurut Jenis Kelamin (persen), Agustus 2013-2015	28
Grafik 27.	TPT Penduduk Umur Muda Menurut Daerah Tempat Tinggal (persen), Agustus 2013-2015.....	28
Grafik 28.	Share Penganggur Muda (persen), Agustus 2013-2015.....	30
Grafik 29.	TPT Menurut Tingkat Pendidikan (persen), Agustus 2013-2015	31
Grafik 30.	Persentase Penganggur Menurut Tingkat Pendidikan dan Kabupaten/Kota, Agustus 2013-2015	33
Grafik 31.	Share Setengah Pengangguran Menurut Tingkat Pendidikan, Agustus 2013 – 2015.....	35
Grafik 32.	Persentase Setengah Pengangguran Terhadap jumlah Pekerja, Agustus 2013 – 2015.....	36
Grafik 33.	Persentase Setengah Pengangguran Terhadap jumlah Pekerja Menurut Tingkat Pendidikan, Agustus 2013 – 2015.....	36
Grafik 34.	Tingkat Ketidakaktifan (Persen), Agustus 2013 – 2015	38
Grafik 35.	Tingkat Ketidakaktifan Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, Agustus 2015	39
Grafik 36.	Persentase Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan, Agustus 2013 – 2015.....	41
Grafik 37.	Persentase Angkatan Kerja (Persen), Agustus 2015	42
Grafik 38.	Persentase Angkatan Kerja (Persen) Menurut Kelompok Umur, Agustus 2015	43

BAB I

PENDAHULUAN

Data ketenagakerjaan merupakan aspek penting untuk menggambarkan indikator pasar tenaga kerja di Indonesia. Salah satu sumber penyajian indikator ini berasal dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Dalam upaya memonitor dinamika ketenagakerjaan, agar para pengambil keputusan dapat lebih cepat dalam mengambil kebijakan untuk mengatasi dan memperbaiki permasalahan ketenagakerjaan khususnya di Indonesia. BPS sejak Triwulan I Februari 2011 menyusun publikasi yang merujuk pada publikasi Organisasi Buruh Internasional (*International Labour Organization-ILO*), yaitu Indikator Pasar Tenaga Kerja (*Key Indicators of the Labour Market-KILM*). ILO telah meluncurkan KILM pada tahun 1999 untuk melengkapi program pengumpulan data secara rutin dan untuk meningkatkan penyebaran data pada unsur utama dari pasar tenaga kerja dunia. Edisi KILM Indonesia ini merujuk pada KILM yang diterbitkan ILO pada tahun 2005.

1.1. SAKERNAS DAN ANALISIS KETENAGAKERJAAN

Data ketenagakerjaan yang dikumpulkan oleh BPS melalui sensus dan survei antara lain: Sensus Penduduk (SP), Survei Penduduk Antar Sensus (Supas), Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), dan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas). Dari survei-survei tersebut, hanya Sakernas yang dirancang khusus untuk mengumpulkan data yang dapat menggambarkan keadaan umum ketenagakerjaan antar periode pencacahan.

Secara umum, tujuan pengumpulan data melalui Sakernas adalah menyediakan data pokok terkait ketenagakerjaan yang berkesinambungan. Secara khusus, untuk memperoleh informasi data jumlah penduduk yang bekerja, pengangguran dan penduduk yang pernah berhenti/pindah bekerja serta perkembangannya di tingkat kabupaten/kota, provinsi, maupun nasional.

Kegiatan pengumpulan data ketenagakerjaan pertama kali dilaksanakan tahun 1976. Sampai dengan saat ini, Sakernas mengalami berbagai perubahan, baik dalam periode pencacahan maupun cakupan sampel wilayah dan rumah tangga. Tahun 1986 sampai dengan 1993 Sakernas dilaksanakan secara

triwulanan, tahun 1994 sampai dengan 2001 secara tahunan setiap bulan Agustus, sedangkan tahun 2002 sampai dengan 2004 selain secara tahunan juga dilaksanakan secara triwulanan. Mulai tahun 2005 sampai dengan tahun 2010, Sakernas dilakukan secara semesteran.

Dengan semakin mendesaknya tuntutan data ketenagakerjaan, baik variasi, kontinuitas, kemutakhiran, dan peningkatan akurasi data yang dihasilkan, maka pengumpulan data Sakernas mulai tahun 2011 hingga tahun 2014 dilakukan kembali secara triwulanan yaitu bulan Februari (Triwulan I), Mei (Triwulan II), Agustus (Triwulan III), dan November (Triwulan IV), yang penyajian datanya dirancang sampai tingkat provinsi. Namun demikian, untuk pelaksanaan Sakernas Triwulan III (bulan Agustus) selain sampel triwulanan juga terdapat sampel tambahan, hal ini dilakukan untuk kepentingan angka estimasi penyajian data sampai tingkat kabupaten/kota. Pada November 2014 karena adanya berbagai alasan Sakernas tidak dilaksanakan. Pada tahun 2015 ini, Sakernas kembali dilaksanakan semesteran (dua kali setahun) di seluruh wilayah Republik Indonesia. Jumlah sampel Sakernas pada Agustus sekitar 200.000 rumah tangga.

Dari setiap rumah tangga terpilih dikumpulkan keterangan mengenai keadaan umum setiap anggota rumah tangga, yang mencakup nama, hubungan dengan kepala rumah tangga, jenis kelamin, dan umur. Khusus untuk anggota rumah tangga yang berumur 10 tahun ke atas, akan ditanyakan keterangan mengenai status perkawinan, pendidikan, pekerjaan, pengangguran, dan pengalaman kerja. Sebagai catatan, rumah tangga korps diplomatik, rumah tangga yang tinggal di blok sensus khusus, dan rumah tangga khusus yang berada di blok sensus biasa tidak dipilih dalam sampel.

1.2. SAKERNAS DAN KILM

Dengan berbagai macam variabel yang dikumpulkan pada Sakernas, dapat disusun serangkaian indikator kunci yang merujuk pada publikasi ILO, yaitu KILM. Tetapi yang perlu menjadi catatan adalah, pada saat melakukan interpretasi data hasil Sakernas dengan data ketenagakerjaan dari sumber lain (SP, Supas, dan Susenas), perlu memperhatikan beberapa hal, karena data-data tersebut tidak dapat dibandingkan secara langsung.

Beberapa faktor perlu dipertimbangkan oleh para pengguna data dalam menginterpretasi dan menganalisis data ketenagakerjaan yang tersedia. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan tersebut meliputi:

1) Tujuan Survei

Sakernas merupakan survei khusus untuk mengumpulkan data ketenagakerjaan. Sedangkan SP maupun SUPAS bertujuan untuk mengetahui perubahan komposisi dan struktur penduduk dari sisi demografi secara umum. Dengan demikian, informasi yang dikumpulkan dalam SP dan SUPAS lebih banyak dan beragam, antara lain meliputi data pendidikan, migrasi, Keluarga Berencana, dan ketenagakerjaan. Begitu pula informasi yang dikumpulkan melalui Susenas lebih beragam sifatnya, seperti data pengeluaran atau konsumsi, ketenagakerjaan, kesehatan, dan perumahan. Perbedaan tujuan survei ini menyebabkan kualitas data ketenagakerjaan antar berbagai survei tersebut relatif berbeda.

2) Ukuran Sampel

Ukuran sampel dalam Sakernas berbeda dengan ukuran sampel dalam SP, SUPAS, maupun Susenas. Perbedaan ini menyebabkan *sampling error* yang dikandung oleh angka perkiraan dari masing-masing sumber data juga berbeda. Semakin kecil ukuran sampel, maka akan semakin besar *sampling error*-nya.

3) Faktor Pengali/Penimbang

Data ketenagakerjaan sejak Februari 2014 hingga Agustus 2015 menggunakan penimbang hasil Proyeksi Penduduk tahun 2010-2035.

4) Kualitas Petugas Lapangan

Sampai dengan Semester II (Agustus) 2006, petugas Sakernas hanya terdiri dari pencacah dan pengawas/pemeriksa. Mulai Sakernas Semester I (Februari) 2007 hingga Sakernas Semester II (Agustus) 2010, pencacahan dilakukan secara tim, dalam 1 (satu) tim terdiri dari 2 (dua) pencacah dan 1 (satu) koordinator tim. Petugas-petugas tersebut pada umumnya adalah pegawai BPS yang ada di kecamatan (Koordinator Statistik Kecamatan-KSK) dan BPS Kabupaten/Kota setempat. Sebagian besar dari mereka umumnya telah mempunyai pengalaman dalam berbagai survei maupun sensus serta lebih

menguasai medan/lapangan. Sejak 2011 hingga saat ini, petugas Sakernas tidak lagi secara tim, tetapi terdiri dari pencacah dan pengawas, dimana seorang pengawas membawahi 2-3 orang pencacah.

5) Perencanaan Kuesioner

Cara menyusun pertanyaan mengenai ketenagakerjaan dalam kuesioner dapat berpengaruh terhadap hasil survei maupun sensus. Ini meliputi bentuk kalimat/pertanyaan yang tertulis, urutan pertanyaan, pemilihan kata-kata yang tepat dalam pertanyaan, banyaknya pertanyaan, maupun jenis keterangan yang ditanyakan. Dalam Sakernas, telah diusahakan bentuknya ringkas/ sederhana, mudah dimengerti, serta pertanyaan pokoknya tidak berubah-ubah.

6) Waktu Pelaksanaan/Pencacahan

Waktu pelaksanaan lapangan antara Sakernas, Susenas, SP, dan Supas berbeda. Hal tersebut dapat menyebabkan perbedaan hasil yang diperoleh karena pengaruh musiman.

Penyusunan indikator pasar tenaga kerja (KILM) pada awalnya dirancang dengan dua tujuan utama, yaitu:

- 1) Menyajikan indikator inti pasar tenaga kerja;
- 2) Meningkatkan ketersediaan indikator-indikator ketenagakerjaan, untuk memantau perkembangan pasar tenaga kerja terkini. Indikator-indikator ini merupakan hasil kolaborasi yang melibatkan ILO bersama para ahli dari Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (*Organisation for Economic Co-operation and Development-OECD*) dan beberapa perwakilan nasional dari Departemen Tenaga Kerja dan kantor statistik berbagai negara.

1.3. PERAN KILM DI BIDANG KETENAGAKERJAAN

Identifikasi dan kuantifikasi *inefisiensi* dalam pasar tenaga kerja, seperti *underutilization* tenaga kerja dan defisit pekerjaan yang layak (*decent work*) merupakan langkah pertama dalam merancang kebijakan ketenagakerjaan, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk yang bekerja, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi.

Pandangan luas dunia kerja menuntut pengumpulan data yang lengkap, pengorganisasian, dan analisis informasi pasar tenaga kerja. Dalam konteks ini,

KILM dapat berfungsi sebagai alat dalam memantau dan menilai banyak hal, yang terkait dengan fungsi pasar tenaga kerja. Berikut ini adalah beberapa contoh bagaimana KILM dapat digunakan untuk merumuskan kebijakan di bidang ketenagakerjaan.

Beberapa peran KILM dalam analisis pasar tenaga kerja antara lain:

1) Mempromosikan Agenda ILO: Pekerjaan yang Layak (*Decent Work*).

Salah satu tujuan agenda ILO mempromosikan pekerjaan yang layak adalah untuk memberikan kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh pekerjaan produktif, dalam kondisi kebebasan, kesetaraan, dan keamanan. Menerapkan konsep "layak" untuk segala bentuk kegiatan ekonomi merupakan sesuatu yang multitafsir. Persepsi mengenai upah yang layak dapat berbeda secara signifikan dari satu orang ke orang lain.

Selain pekerjaan yang layak, permasalahan yang muncul dalam dunia ketenagakerjaan adalah kurangnya kesempatan kerja. Kurangnya kesempatan kerja selain bisa diidentifikasi menggunakan pendekatan indikator pengangguran (KILM 8 dan KILM 9), juga bisa menggunakan indikator yang lebih rinci yaitu tingkat ketidakaktifan (KILM 13). Untuk mengetahui kualitas dan jenis pekerjaan dapat dilakukan pendekatan, misalnya, dengan mengidentifikasi individu yang masuk dalam kelompok pekerja rentan (*vulnerable employment*), yaitu penduduk bekerja berdasarkan status dan sektor (KILM 3 dan KILM 4), jam kerja yang berlebih/*exceeds working hours* (KILM 6), penduduk bekerja di sektor informal (KILM 7), dan setengah penganggur (KILM 12).

2) Pemantauan Pencapaian Tujuan *Millenium Development Goals* (MDGs).

Tujuan utama kebijakan nasional serta strategi nasional pembangunan sebagai bagian dari upaya untuk mencapai Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) adalah meningkatnya jumlah pekerja penuh (*full employment*), penduduk bekerja yang produktif, dan penyediaan pekerjaan yang layak (*decent work*). Pekerjaan yang layak dan produktif merupakan isu sentral untuk mengatasi kemiskinan dan kelaparan. MDGs pertama memasukkan target baru 1b (yang disepakati pada tahun 2008) yaitu "mencapai pekerja penuh dan layak bagi semua, termasuk perempuan dan orang-orang muda". Empat indikator yang

dipilih untuk memantau kemajuan menuju sasaran 1b dalam MDGs tersedia dalam KILM, yaitu rasio penduduk bekerja terhadap jumlah penduduk (*Employment to Population Ratio-EPR*), proporsi penduduk bekerja yang hidup di bawah garis kemiskinan, tingkat pekerja rentan (*vulnerable employment*), dan tingkat pertumbuhan produktivitas tenaga kerja, sesuai dengan indikator KILM 2, KILM 3, KILM 18, dan KILM 20.

3) Memantau kesetaraan gender di pasar tenaga kerja.

Wanita menghadapi tantangan khusus dalam mencapai pekerjaan yang layak. Sebagian besar indikator KILM dipisahkan menurut jenis kelamin, yang memungkinkan untuk melakukan perbandingan kesempatan kerja laki-laki dan perempuan.

4) Mengkaji tenaga kerja di era globalisasi.

Globalisasi memiliki potensi manfaat bagi semua, namun sampai saat ini hal tersebut tidak mencakup orang banyak. Oleh karena itu, perlu satu cara untuk menghadapi era globalisasi dengan tetap mendorong penciptaan kesempatan kerja yang layak untuk semua. Salah satu cara untuk melakukannya adalah membuat tenaga kerja menjadi tujuan sentral dari kebijakan ekonomi makro dan sosial. Indikator KILM dapat bermanfaat dalam hal ini, dengan memonitor dinamika ketenagakerjaan yang terkait dengan globalisasi. Misalnya, adanya penelitian yang menunjukkan bahwa kehilangan pekerjaan/penciptaan serta perubahan upah dan produktivitas dipengaruhi oleh globalisasi. Jika indikator mencerminkan konsekuensi negatif dari globalisasi, maka pembuat kebijakan memiliki pilihan untuk mengubah kebijakan ekonomi makro sehingga dapat meminimalkan biaya penyesuaian (*adjustment cost*) dan mendistribusikan keuntungan dari globalisasi secara lebih adil.

1.4. ANALISIS PASAR TENAGA KERJA MENGGUNAKAN KILM

Semakin banyak negara yang mempublikasikan angka pengangguran nasional dan data ketenagakerjaan agregat. Namun, pengguna harus bijaksana menggunakan statistik ini dalam rangka melihat dinamika pasar tenaga kerja. Salah satu keuntungan menggunakan tingkat pengangguran agregat, misalnya, relatif lebih mudahnya dalam hal pengumpulan dan komparasi antardaerah. Akan tetapi, melihat angka pengangguran saja dengan mengabaikan unsur-unsur lain

dari pasar tenaga kerja yang lain merupakan suatu kekeliruan. Penting untuk menyadari bahwa pengangguran “hanya” merupakan salah satu aspek dalam indikator ketenagakerjaan. Oleh karena itu, langkah pertama dalam analisis pasar kerja, adalah menentukan rincian status tenaga kerja dalam populasi.

Penduduk umur kerja dapat didekomposisi menjadi orang-orang yang tidak aktif secara ekonomi (di luar tenaga kerja/bukan angkatan kerja, KILM 13); bekerja (KILM 2), atau tidak bekerja dan mencari pekerjaan (menganggur, KILM 8). Semakin besar penduduk yang termasuk dalam kelompok pengangguran atau bukan angkatan kerja atau keduanya, menunjukkan *underutilized* yang besar dari angkatan kerja yang potensial. Pemerintah yang menghadapi situasi ini semestinya berusaha untuk menganalisis alasan untuk tidak aktif, yang pada gilirannya bisa menentukan pilihan kebijakan yang penting untuk mengubah situasi.

Jika mayoritas penduduk yang aktif secara ekonomi terdiri dari perempuan yang tidak bekerja karena mereka memiliki tanggung jawab rumah tangga, pemerintah mungkin dapat mendorong lingkungan yang bisa memfasilitasi partisipasi ekonomi perempuan, misalnya melalui pembentukan pusat-pusat penitipan anak atau jam kerja yang fleksibel bagi perempuan. Program untuk menggalakkan pekerjaan pada penyandang cacat juga dapat membantu menurunkan tingkat ketidakaktifan, jika cacat adalah alasan umum untuk tidak aktif. Hal yang lebih sulit adalah mengembalikan orang yang telah meninggalkan pasar kerja ke dalam angkatan kerja karena alasan "putus asa"/*discourage worker*, yaitu karena mereka merasa bahwa tidak tersedia pekerjaan yang sesuai bagi mereka, dan mereka tidak memiliki kualifikasi yang tepat, atau karena mereka tidak tahu ke mana harus mencari pekerjaan.

Pengangguran juga harus dianalisis menurut jenis kelamin (KILM 8), umur (KILM 9), lamanya menganggur (KILM 10), dan tingkat pendidikan (KILM 11), untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik dari komposisi pengangguran, sehingga bisa menentukan kebijakan pengangguran yang tepat.

Karakteristik lain dari pengangguran yang tidak ditampilkan dalam KILM, diantaranya latar belakang sosial-ekonomi, pengalaman kerja, juga penting untuk dianalisis apabila data karakteristik tersebut tersedia, sehingga dapat menentukan

kelompok mana yang menghadapi kesulitan tertentu. Paradoksnya, tingkat pengangguran yang rendah mungkin menyamarkan tingkat kemiskinan dalam suatu negara (KILM 20), sedangkan tingkat pengangguran tinggi dapat terjadi di negara-negara dengan perkembangan ekonomi yang signifikan dengan insiden kemiskinan rendah.

Di negara-negara berkembang dengan ketersediaan perlindungan sosial yang baik atau bila terdapat berbagai jaminan sosial atau dukungan yang tersedia, maka bagi penduduk bekerja lebih dapat meluangkan waktu untuk mencari pekerjaan yang lebih diinginkan. Oleh karena itu, masalah di banyak negara berkembang bukanlah tingkat pengangguran yang tinggi, melainkan kurangnya kesempatan kerja yang layak dan produktif bagi mereka yang bekerja.

Hal tersebut membawa kita pada kebutuhan untuk membedah jumlah total lapangan kerja serta untuk menilai kesejahteraan penduduk yang bekerja, di bawah suatu konsep bahwa tidak semua pekerjaan adalah "pekerjaan yang layak". Jika penduduk yang bekerja terdiri dari sebagian besar bekerja sendiri atau pekerja keluarga (lihat KILM 3), lalu, dibandingkan dengan total penduduk yang bekerja (KILM 2), apakah indikator ini akan kehilangan nilainya sebagai ukuran normatif? Apakah orang-orang ini bekerja? Ya, menurut definisi internasional.

Apakah mereka dalam pekerjaan yang layak? Mungkin tidak. Meskipun secara teknis bekerja, beberapa penduduk bekerja yang berusaha sendiri atau pekerja keluarga akan bertahan dengan pekerjaan mereka saat ini sehingga batas antara bekerja dan menganggur sangat tipis. Hal ini terlihat ketika terbuka lowongan untuk pekerjaan yang bergaji (buruh/karyawan/pegawai) di ekonomi formal, rombongan tenaga kerja ini akan berlomba-lomba untuk mengajukan lamaran.

Identifikasi lebih lanjut harus dilakukan, untuk menentukan apakah penduduk yang bekerja tersebut umumnya miskin (KILM 20), terlibat dalam kegiatan pertanian tradisional (KILM 4), menjual barang-barang di pasar informal tanpa keamanan kerja (KILM 7), jam kerja yang berlebihan (KILM 6), atau ingin memperoleh pekerjaan tambahan (KILM 12).

BAB II

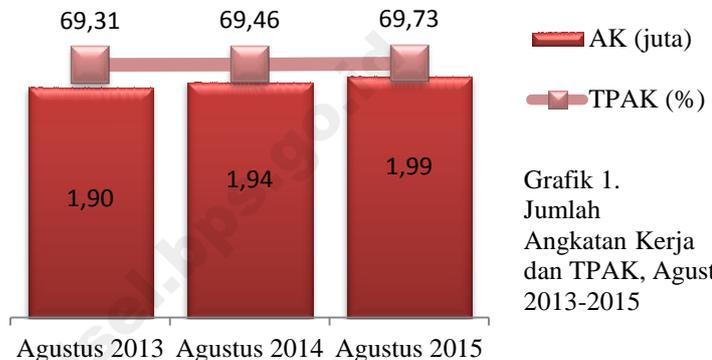
PARTISIPASI DAN INDIKATOR TENAGA KERJA

KILM 1. TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA

Jumlah penduduk umur 15 tahun ke atas yang termasuk angkatan kerja berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2015 mencapai 1,99 juta orang. Jumlah tersebut mengalami kenaikan sebanyak 46,0 ribu orang dibandingkan keadaan Agustus 2014 (1,94 juta orang) dan mengalami peningkatan sebanyak 86,9 ribu orang dibandingkan keadaan Agustus 2013 (1,90 juta orang).

Jumlah angkatan kerja dan TPAK mengalami peningkatan

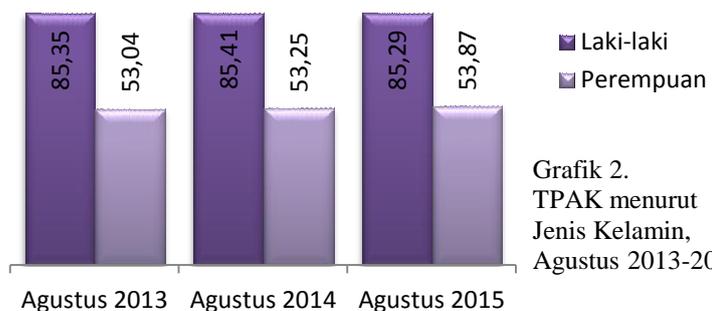
Hasil Sakernas Agustus 2015 menunjukkan bahwa TPAK Kalimantan Selatan adalah sebesar 69,73 persen. Peningkatan jumlah angkatan kerja selama Agustus 2013-Agustus 2015



Grafik 1. Jumlah Angkatan Kerja dan TPAK, Agustus 2013-2015

searah dengan peningkatan TPAK selama periode tersebut. Dibandingkan TPAK Agustus 2014 terjadi kenaikan sebesar 0,27 persen poin (69,46 persen) dan mengalami kenaikan sebesar 0,41 persen poin dibandingkan TPAK Agustus 2013 (69,31 persen)

Menurut Jenis Kelamin TPAK laki-laki cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan TPAK perempuan. TPAK laki-laki pada keadaan Agustus



Grafik 2. TPAK menurut Jenis Kelamin, Agustus 2013-2015

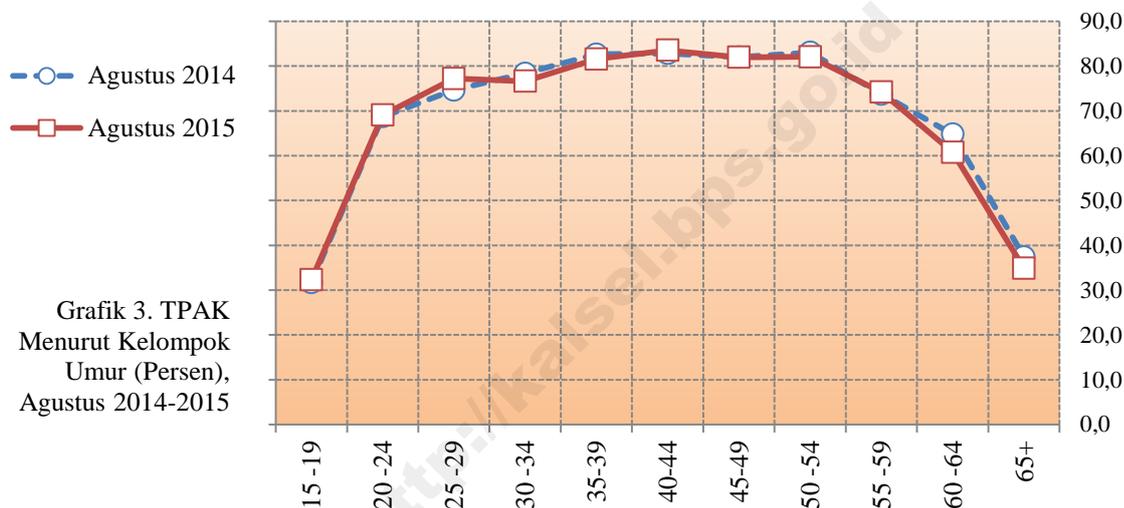
2015 mencapai 85,29 persen sementara TPAK perempuan hanya

TPAK laki-laki lebih tinggi dari TPAK perempuan

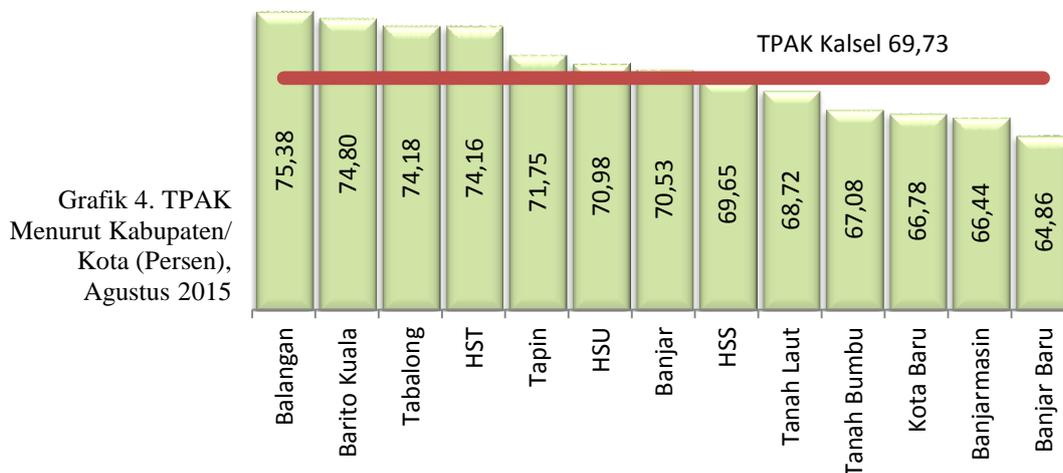
53,87 persen. Hal tersebut dapat diartikan bahwa dari 100 orang penduduk usia kerja laki-laki, sekitar 85 orang adalah termasuk angkatan kerja. Pada penduduk perempuan dari 100 orang penduduk usia kerja perempuan hanya sekitar 54 orang yang termasuk angkatan kerja. Pola yang sama juga terjadi pada periode Agustus 2014 dan Agustus 2013, dimana TPAK laki-laki lebih tinggi sekitar 25 persen dibanding TPAK perempuan.

TPAK Kelompok umur tidak mengalami perubahan

Secara total TPAK Agustus 2015 hampir tidak terjadi perubahan yang nyata dibandingkan TPAK Agustus 2014. Hal yang sama juga berlaku terjadi pada semua kelompok umur.



Grafik 3. TPAK Menurut Kelompok Umur (Persen), Agustus 2014-2015



Grafik 4. TPAK Menurut Kabupaten/Kota (Persen), Agustus 2015

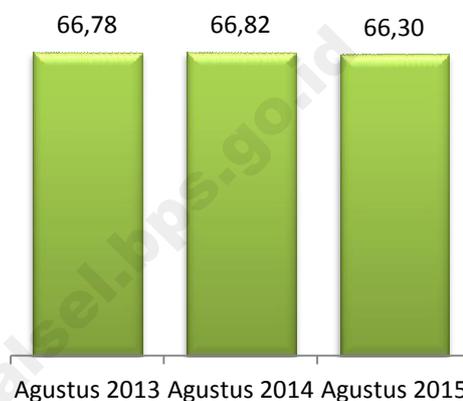
TPAK menurut kabupaten/kota maka TPAK tertinggi adalah Kabupaten Balangan (75,38 persen), Barito Kuala (74,80 persen) dan Tabalong (74,18 persen). TPAK terendah hasil Sakernas Agustus 2015 adalah Kota Banjarbaru (64,86 persen) dan Kota Banjarmasin (66,44 persen).

TPAK tertinggi Kabupaten Balangan dan Barito Kuala

KILM 2. RASIO PENDUDUK BEKERJA TERHADAP JUMLAH PENDUDUK (*EMPLOYMENT TO POPULATION RATIO - EPR*)

Rasio penduduk bekerja terhadap jumlah penduduk (EPR) di Kalimantan Selatan keadaan Agustus 2015 sebesar 66,30 persen. Artinya dari 100 orang penduduk usia 15 tahun ke atas, terdapat 66 orang yang bekerja pada Agustus 2015. EPR ini mengalami penurunan jika dibandingkan keadaan Agustus 2013 maupun Agustus 2014, yang masing-masing mengalami penurunan sebesar 0,48 dan 0,43 poin.

EPR Agustus 2015 sebesar 66,30 persen

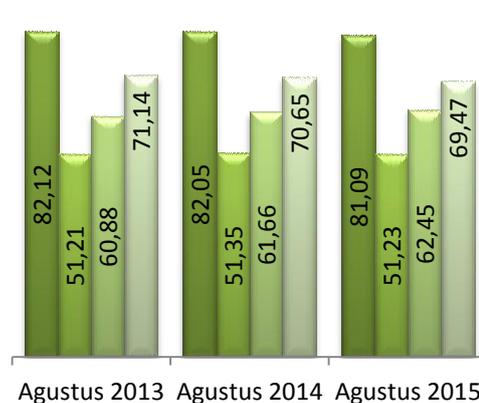


Grafik 5. *Employment to Population Ratio, Agustus 2013-2015*

Pada periode Agustus 2013 - Agustus 2015 menurut jenis kelamin, EPR laki-laki selalu lebih tinggi hingga 1,5 kali dibandingkan EPR perempuan. Pada Agustus 2015, EPR laki-laki 81,09 persen sedangkan EPR Perempuan hanya sebesar 51,23 persen.

EPR perdesaan lebih tinggi dari perkotaan

Berdasarkan klasifikasi wilayah, EPR daerah perkotaan memiliki kecenderungan lebih rendah dibandingkan EPR daerah pedesaan.

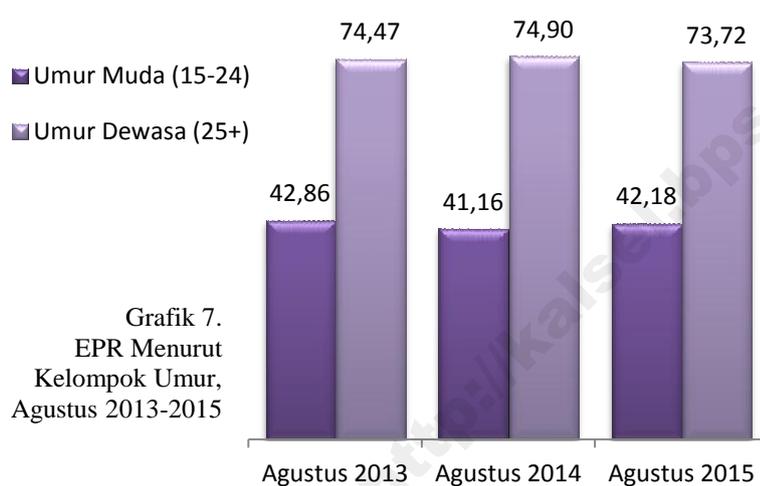


Grafik 6. *EPR Menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal, Agustus 2013-2015*

Agustus 2015, EPR daerah perkotaan tercatat sebesar 62,45 persen. Angka ini lebih rendah dibandingkan EPR daerah perdesaan yang sebesar 69,47 persen. EPR daerah perkotaan selama Agustus 2014-Agustus 2015 mengalami kenaikan 0,79 poin, namun EPR wilayah perdesaan mengalami penurunan sebesar 1,18 poin.

EPR kelompok umur dewasa lebih tinggi dibandingkan EPR kelompok umur muda

Gap antara EPR penduduk kelompok umur muda (15-24 tahun) lebih rendah dibandingkan penduduk kelompok umur dewasa (25 tahun keatas) dengan selisih sekitar 30 poin. Selama periode Agustus 2013-Agustus 2015, EPR kedua kelompok umur tersebut hampir tidak mengalami perubahan yang nyata. EPR kelompok muda pada Agustus 2015 tercatat sebesar 42,18 persen. Angka ini mengalami sedikit penurunan sebesar 0,68 poin dibandingkan



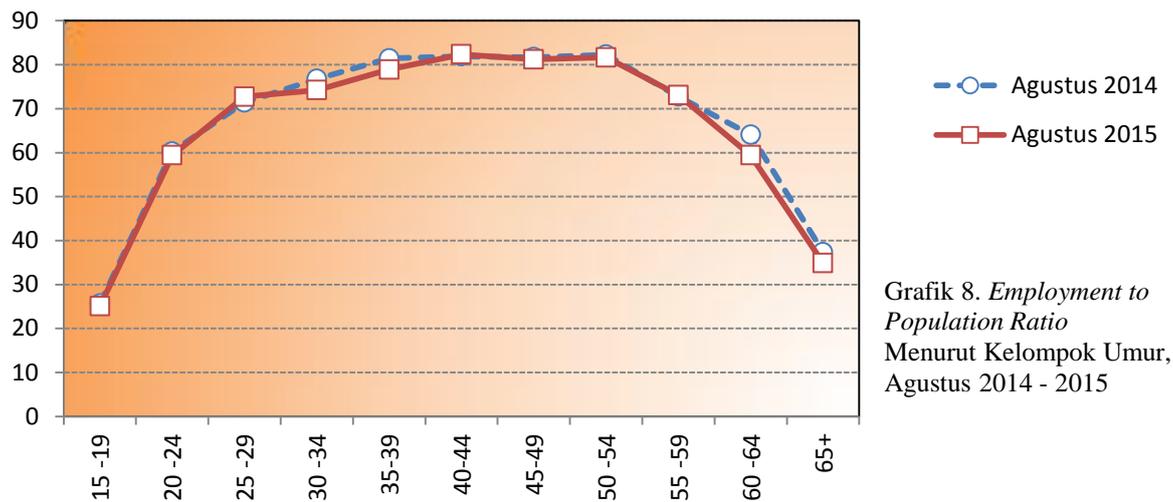
Grafik 7. EPR Menurut Kelompok Umur, Agustus 2013-2015

Agustus 2013 sebesar 42,86 persen. Hal serupa juga terjadi untuk kelompok umur dewasa. Selama dua tahun terakhir mengalami penurunan sebesar 0,75 poin menjadi 73,72 persen Agustus 2015.

EPR Tertinggi pada kelompok umur 40-44 tahun

Pola EPR berdasarkan kelompok umur yang terlihat pada Grafik 8 mirip dengan pola TPAK pada Grafik 3. Hal ini menggambarkan dominasi jumlah penduduk bekerja pada komponen penduduk usia kerja. Puncak EPR untuk keadaan Agustus 2015 berada pada kelompok umur 40-44 tahun dengan EPR mencapai 82,34 persen. Pada periode yang sama keadaan setahun yang lalu, EPR tertinggi pada kelompok umur 50-54 tahun yaitu sebesar 82,29 persen.

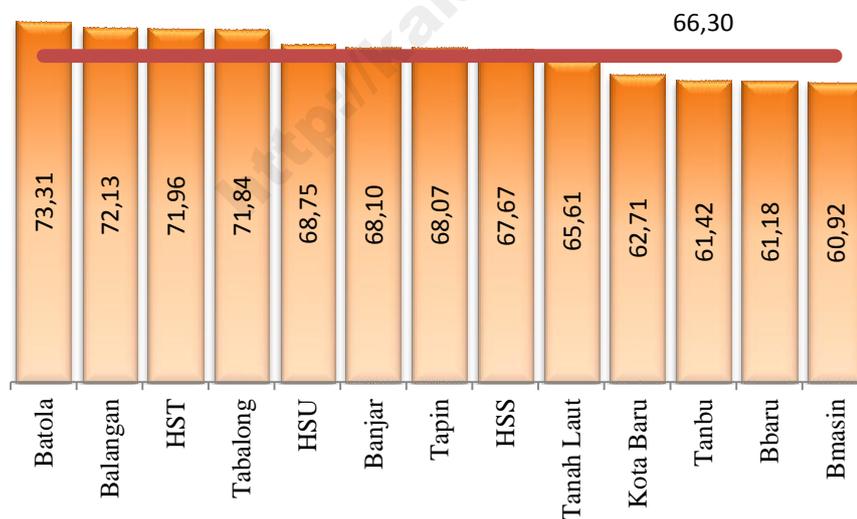
Pola EPR menunjukkan tidak terjadi perubahan nyata selama kurun waktu setahun terakhir. Nilai EPR Agustus 2014 lebih tinggi pada hampir semua kelompok umur kecuali pada kelompok umur 25-29 tahun.



Grafik 8. *Employment to Population Ratio* Menurut Kelompok Umur, Agustus 2014 - 2015

Menurut Kabupaten/Kota maka EPR tertinggi pada keadaan Agustus 2015 adalah Kabupaten Barito Kuala (73,31 persen), Balangan (72,13 persen) dan Hulu Sungai Tengah (71,96 persen). Kabupaten/Kota dengan nilai EPR terendah adalah Kota Banjarmasin dan Banjarbaru, dengan nilai EPR masing-masing 60,92 persen dan 61,18 persen.

EPR tertinggi di Kabupaten Barito Kuala



Grafik 9. EPR Menurut Kabupaten/Kota, Agustus 2015

KILM 3. PENDUDUK BEKERJA MENURUT STATUS PEKERJAAN UTAMA

Mayoritas pekerja di Kalimantan Selatan berstatus berusaha

Persentase penduduk bekerja menurut status pekerjaan utama pada Agustus 2015 memiliki proporsi yang tidak begitu berbeda jika dibandingkan dengan keadaan pada periode sebelumnya (Agustus 2013 dan Agustus 2014). Berdasarkan Tabel 1, persentase terbesar penduduk bekerja diduduki oleh penduduk dengan status berusaha (46,56 persen), diikuti dengan penduduk bekerja dengan upah/gaji (38,07 persen) dan penduduk bekerja dengan status pekerja keluarga/tidak dibayar (15,37 persen).

Tabel 1. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama, Agustus 2013 - 2015

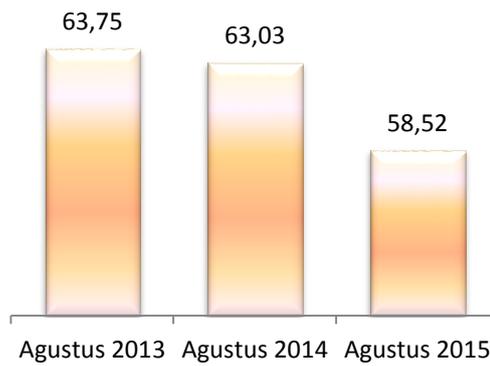
Status Pekerjaan Utama	Agustus 2013	Agustus 2014	Agustus 2015
(1)	(2)	(3)	(4)
Penduduk bekerja dengan upah/gaji (buruh/karyawan/ pegawai)	32,87	34,04	38,07
Berusaha	49,35	48,87	46,56
Pengusaha	3,38	2,93	3,41
Berusaha sendiri + berusaha dibantu buruh tidak tetap	38,69	39,61	35,85
Pekerja bebas	7,28	6,33	7,30
Pekerja keluarga	17,78	17,09	15,37

Dibandingkan kondisi setahun yang lalu (Agustus 2014), proporsi penduduk bekerja dengan status berusaha mengalami penurunan sebesar 2,31 poin, proporsi buruh/karyawan/pegawai meningkat sebesar 4,03 poin dan proporsi pekerja keluarga menurun sebesar 1,72 poin.

Terjadi penurunan persentase pekerja rentan

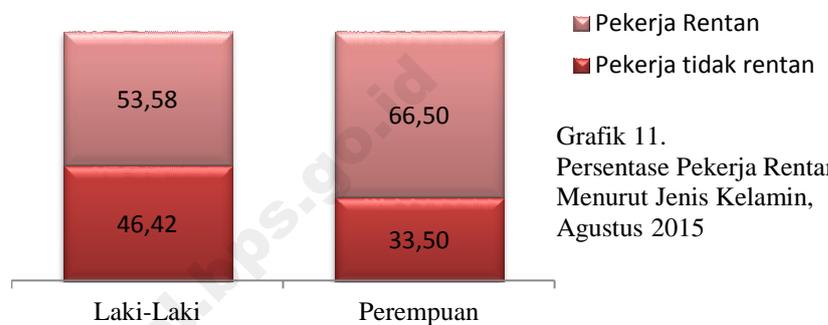
Khusus untuk pekerja rentan/*vulnerable employment* mencakup berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar, pekerja bebas dan pekerja keluarga. Pada Agustus 2015 pekerja rentan mencapai 58,52 persen, artinya dari 100 orang penduduk bekerja terdapat hampir sekitar 59 orang termasuk kategori pekerja

rentan. Dibandingkan keadaan Agustus 2013 maupun Agustus 2014, persentase pekerja rentan terus mengalami penurunan, yaitu sebesar 5,23 poin dan 4,51 poin.



Grafik 10. Persentase Pekerja Rentan, Agustus 2013-2015

Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2015, proporsi pekerja rentan pada pekerja perempuan sebesar 66,50 persen. Artinya sekitar dua pertiga pekerja perempuan masuk ke dalam kategori pekerja rentan. Sementara pada laki-laki, proporsi pekerja rentan sebesar 53,58 persen.



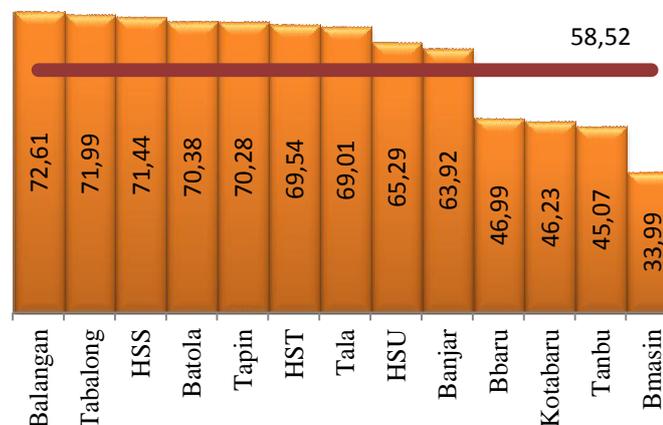
Perempuan cenderung masuk kategori pekerja rentan

Grafik 11. Persentase Pekerja Rentan Menurut Jenis Kelamin, Agustus 2015

Kabupaten/kota dengan persentase pekerja rentan tertinggi pada Agustus 2015, yaitu Kabupaten Balangan (72,61 persen), Kabupaten Tabalong (71,99 persen) dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan (71,44 persen). Untuk kabupaten/kota dengan persentase pekerja rentan terendah adalah Kota Banjarmasin (33,99 persen), Kabupaten

Pekerja rentan tertinggi di Kabupaten Balangan

Tanah Bumbu (45,07 persen) dan Kabupaten Kotabaru (46,23 persen).



Grafik 12. Persentase Pekerja Rentan Menurut Kabupaten/Kota, Agustus 2015

KILM 4. PENDUDUK YANG BEKERJA MENURUT LAPANGAN USAHA

36,01%
*penduduk
Kalimantan
Selatan bekerja
di pertanian*

Kondisi lapangan pekerjaan utama di Kalimantan Selatan pada Agustus 2015 masih didominasi oleh kelompok sektor Jasa (47,83 persen) dan sektor pertanian (36,01 persen). Kondisi ini tidak berubah selama kurun waktu 2 tahun terakhir.

Tabel 2. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama, Agustus 2013 - 2015

Lapangan Pekerjaan Utama	Agustus 2013	Agustus 2014	Agustus 2015
(1)	(2)	(3)	(4)
Pertanian	40,56	39,82	36,01
Manufaktur	17,26	15,90	16,15
Pertambangan	4,24	4,18	3,75
Industri	7,32	6,04	6,70
Listrik, Gas & Air	0,21	0,32	0,30
Bangunan	5,49	5,36	5,40
Jasa-Jasa	42,18	44,28	47,84
Perdagangan	21,42	23,28	24,43
Angkutan dan Pergudangan	3,94	4,27	3,65
Keuangan & Jasa Perusahaan	1,88	1,68	2,40
Jasa Kemasyarakatan	14,94	15,05	17,36
Total	100,00	100,00	100,00

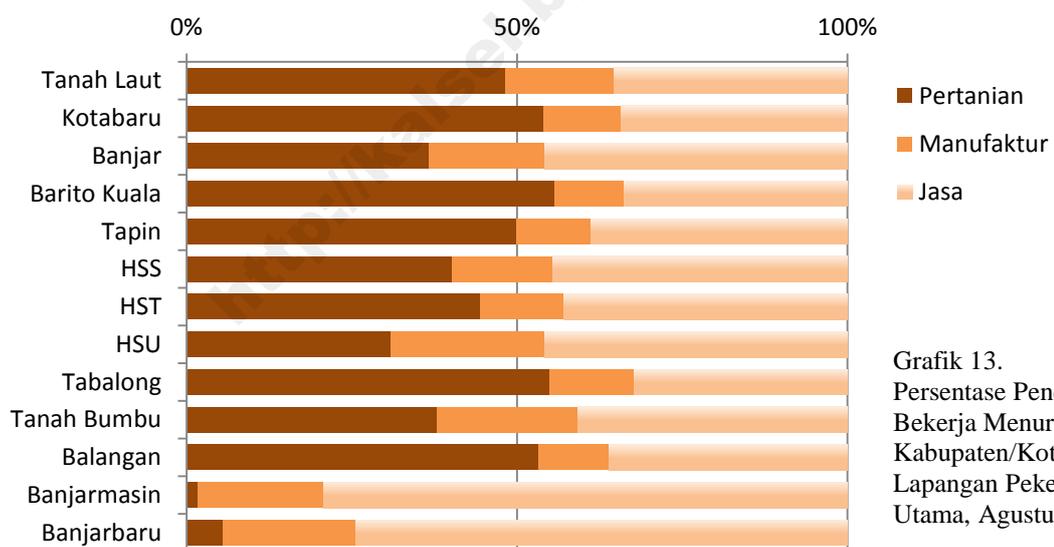
Penyumbang terbesar dari kelompok sektor jasa-jasa adalah sektor perdagangan (24,43 persen) dan sektor jasa kemasyarakatan (17,36 persen). Kelompok sektor manufaktur penyumbang terbesarnya adalah sektor industri (6,70 persen) dan sektor bangunan (5,40 persen).

Dibandingkan Agustus 2014, kelompok sektor jasa-jasa mengalami kenaikan terbesar yaitu sebesar 3,56 poin. Sektor manufaktur juga mengalami sedikit kenaikan sebesar 0,25 poin. Sementara sektor

pertanian dalam setahun terakhir mengalami penurunan kontribusi penyerapan tenaga kerja sebesar 3,81 poin. Penurunan kontribusi sektor pertanian dan peningkatan kelompok sektor jasa-jasa terjadi selama dua tahun terakhir. Sejak Agustus 2013, sektor pertanian telah mengalami penurunan sebesar 4,55 poin. Selama kurun waktu yang sama, kelompok sektor jasa-jasa telah mengalami peningkatan 5,66 poin.

Komposisi sektoral Sakernas Agustus 2015 menurut kabupaten/kota di Kalimantan Selatan menunjukkan bahwa kabupaten/kota dengan persentase tertinggi penduduk bekerja di sektor pertanian adalah Kabupaten Barito Kuala (55,79 persen), kabupaten/kota dengan persentase tertinggi penduduk bekerja di sektor manufaktur adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara (23,25 persen) dan kabupaten/kota dengan persentase tertinggi penduduk bekerja di sektor jasa-jasa adalah Kota Banjarmasin (79,28 persen).

55,79%
penduduk Barito Kuala bekerja di sektor pertanian



Grafik 13.
Persentase Penduduk Bekerja Menurut Kabupaten/Kota dan Lapangan Pekerjaan Utama, Agustus 2015

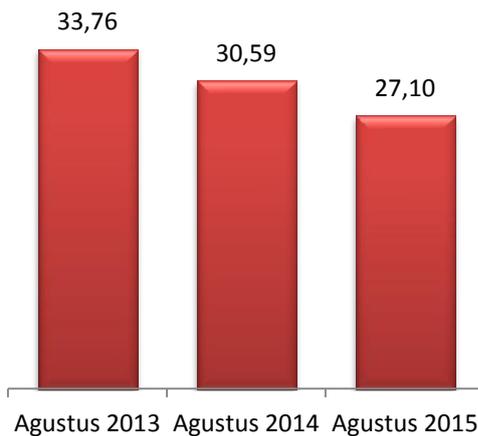
KILM 5. PEKERJA PARUH WAKTU

Jumlah jam kerja berdampak pada kesehatan dan kesejahteraan penduduk yang bekerja, serta tingkat produktivitas dan biaya tenaga perusahaan. Mengukur tingkat dan tren jam kerja di masyarakat untuk berbagai kelompok penduduk bekerja dan untuk

penduduk bekerja secara individu menjadi penting ketika melakukan pemantauan kerja dan kondisi hidup, maupun ketika menganalisis perkembangan ekonomi. Indikator pekerja paruh waktu terfokus pada individu dengan jumlah jam kerja kurang dari 35 jam seminggu (*full time*) tetapi tidak menginginkan tambahan jam kerja atau pekerjaan lainnya.

Tingkat pekerja paruh waktu 27,10 persen

Grafik 14. Tingkat Pekerja Paruh Waktu (persen), Agustus 2013-2015

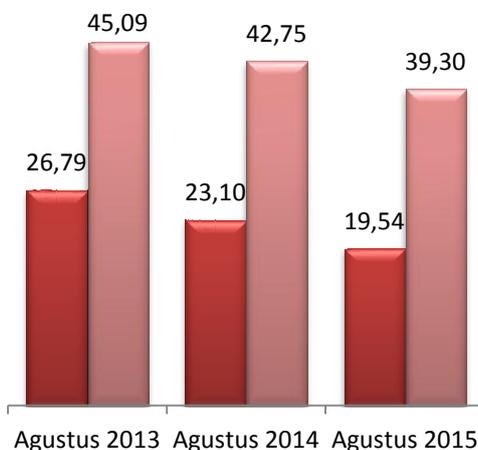


Pada Agustus 2015, tingkat pekerja paruh waktu mencapai 27,10 persen. hal ini dapat diartikan bahwa dari 100 orang yang bekerja, terdapat sekitar 27 orang yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu tetapi tidak menginginkan tambahan jam kerja atau pekerjaan lain.

Tingkat pekerja paruh waktu terus mengalami penurunan dibandingkan dengan keadaan Agustus 2014 yaitu sebesar 3,49 poin, dan 6,66 poin dibandingkan Agustus 2013.

Tingkat Pekerja Paruh Waktu Perempuan lebih tinggi daripada laki-laki

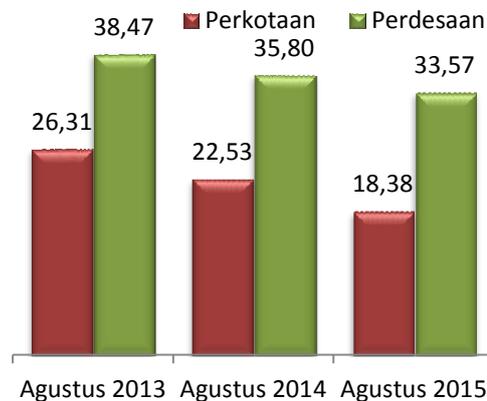
Grafik 15. Tingkat Pekerja Paruh Waktu Menurut Jenis Kelamin (Persen), Agustus 2013-2015



Tingkat pekerja paruh waktu perempuan keadaan Agustus 2015 adalah sebesar 39,30 persen. Jumlah ini hampir dua kali lipat lebih besar dibandingkan tingkat pekerja paruh waktu laki-laki sebesar 19,54 persen. Jika dibandingkan dengan kondisi yang sama selama

dua tahun terakhir, tingkat pekerja paruh waktu laki-laki dan perempuan menunjukkan kecenderungan mengalami penurunan. Dibandingkan Agustus 2013 Pekerja paruh waktu laki-laki dan perempuan mengalami penurunan sebesar 7,25 poin dan 5,79 poin.

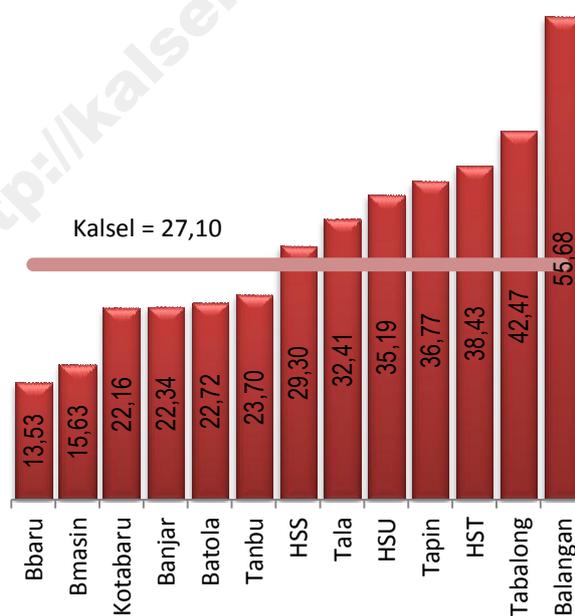
Berdasarkan klasifikasi daerah, tingkat pekerja paruh waktu di perkotaan pada Agustus 2015 sebesar 18,38 persen dan untuk wilayah perdesaan mencapai 33,57 persen. Dibandingkan periode Agustus 2013 dan Agustus 2014 terjadi penurunan tingkat pekerja paruh waktu di perkotaan maupun di perdesaan.



Tingkat pekerja paruh waktu di perkotaan dan perdesaan mengalami penurunan

Grafik 16. Tingkat Pekerja Paruh Waktu Menurut Klasifikasi Wilayah (Persen), Agustus 2013-2015

Merujuk hasil Sakernas Agustus 2015 (Grafik 17), tingkat pekerja paruh waktu tertinggi diduduki oleh Kabupaten Balangan (55,68 persen), posisi kedua diduduki oleh kabupaten Tabalong (42,47 persen) dan posisi ketiga diduduki oleh Kabupaten Hulu Sungai Tengah (38,43 persen). sedangkan tiga kabupaten/kota dengan tingkat pekerja paruh waktu terendah pada Agustus 2015 adalah Kota Banjarbaru (13,53 persen), Kota Banjarmasin (15,63 persen) dan Kabupaten Kotabaru (22,16 persen).



Tingkat pekerja paruh waktu tertinggi di Kabupaten Balangan

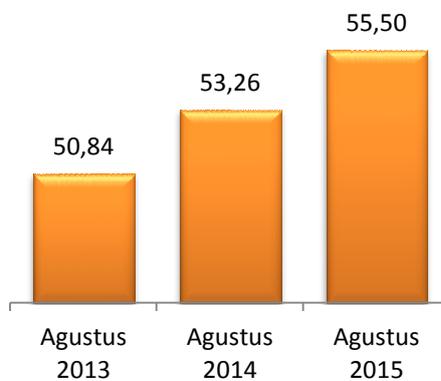
Grafik 17. Tingkat Pekerja Paruh Waktu Menurut Kabupaten/ Kota (persen), Agustus 2015

55,5% pekerja paruh waktu adalah perempuan

Share perempuan pada pekerja paruh waktu berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2015 mencapai 55,50 persen. Artinya dari 100

orang pekerja paruh waktu, sekitar 55 orang diantaranya adalah perempuan. Share pekerja perempuan paruh waktu memiliki kecenderungan mengalami peningkatan selama dua tahun terakhir. Secara rata-rata terjadi peningkatan sebesar 2,33 poin setiap tahunnya sejak Agustus 2013.

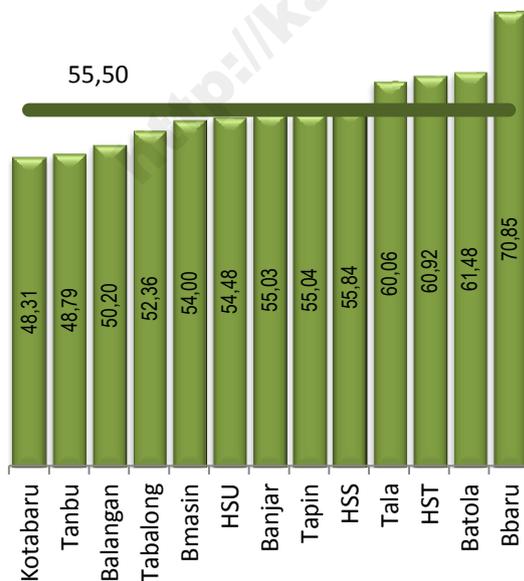
Grafik 18. Share Perempuan pada Pekerja Paruh Waktu (persen), Agustus 2013-2015



70,85% pekerja paruh waktu di Kota Banjarbaru adalah perempuan

Menurut kabupaten/kota dapat dilihat bahwa kabupaten/kota dengan share perempuan tertinggi pada Agustus 2015 adalah Kota Banjarbaru (70,85 persen), Kabupaten Barito Kuala (61,48 persen) dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah (60,92 persen).

Grafik 19. Share Perempuan pada Pekerja Paruh Waktu Menurut Kabupaten/Kota (Persen), Agustus 2015



Sebaliknya kabupaten/kota dengan share perempuan terhadap pekerja paruh waktu terendah hasil sakernas Agustus 2015 berturut-turut adalah Kabupaten Kotabaru (48,31 persen), Kabupaten Tanah Bumbu (48,79 persen) dan Kabupaten Balangan (50,20 persen).

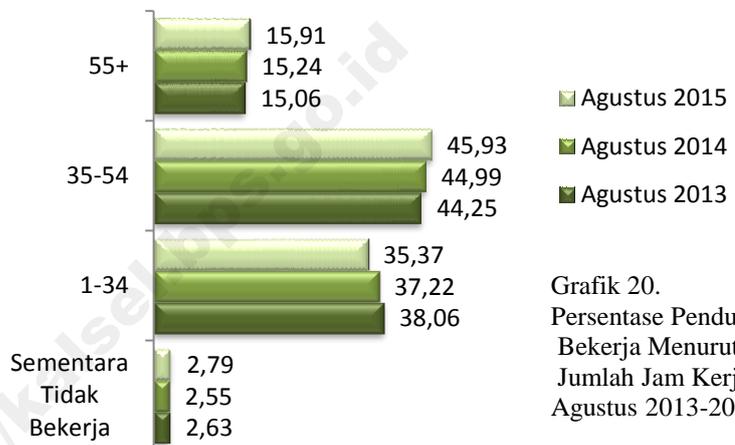
KILM 6. PENDUDUK YANG BEKERJA MENURUT JUMLAH JAM KERJA

Sebagian besar penduduk Kalimantan Selatan bekerja lebih dari 35 jam seminggu. Jumlah ini mencapai 64,63 persen, atau sekitar dua pertiga dari total penduduk yang bekerja. Sementara itu penduduk yang bekerja kurang 35 jam seminggu mencapai 35,37 persen.

64,63% penduduk bekerja lebih dari 35 jam seminggu

Penduduk bekerja kurang dari 35 jam seminggu mengalami penurunan dibandingkan Agustus 2014 dan Agustus 2013 dengan penurunan masing-masing sebesar 1,85 poin dan 2,69 poin. Secara rata-rata, persentase tertinggi penduduk bekerja pada Agustus 2015 berdasarkan jam kerja

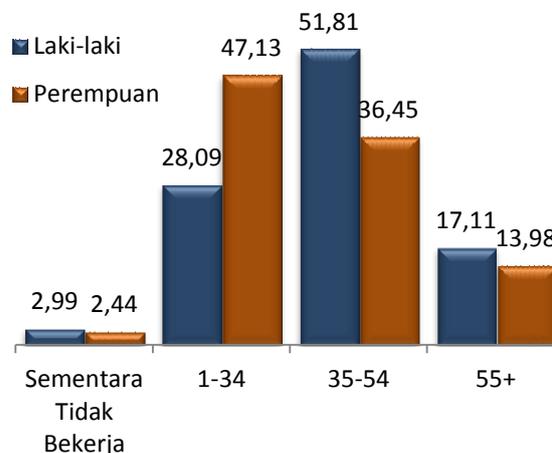
terdapat pada kelompok jam kerja 40–48 jam seminggu yang mencapai 28,63 persen. Selain itu masih terdapat sekitar 15,91 persen penduduk yang bekerja lebih dari 55 jam seminggu.



Grafik 20. Persentase Penduduk Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja, Agustus 2013-2015

Menurut jenis kelamin terlihat bahwa secara umum penduduk perempuan lebih berpeluang untuk bekerja kurang dari 35 jam seminggu dibandingkan penduduk laki-laki. Persentase penduduk perempuan yang jam kerjanya kurang 35 jam seminggu mencapai 47,13 persen. Sementara persentase laki-laki hanya sebesar 28,09 persen.

Penduduk perempuan lebih banyak yang bekerja kurang 35 jam seminggu daripada laki-laki



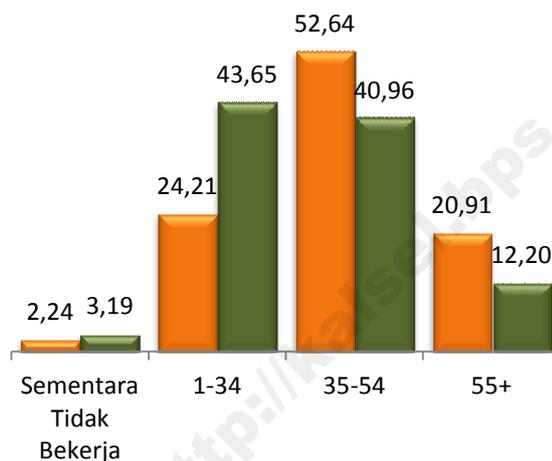
Grafik 21. Persentase Penduduk Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja dan Jenis Kelamin, Agustus 2013-2015

Untuk pekerja dengan jam kerja lebih dari 55 jam seminggu maka terdapat sedikit perbedaan menurut jenis Kelamin. Persentase laki-laki sebesar 17,11 persen. Angka ini sedikit lebih besar dibandingkan persentase perempuan yang bekerja lebih dari 55 jam seminggu yang sebesar 13,98 persen.

Pekerja kurang dari 35 jam seminggu banyak terdapat di daerah pedesaan.

Apabila diamati berdasarkan daerah tempat tinggal, terdapat perbedaan karakteristik jumlah pekerja menurut jam kerja selama seminggu untuk daerah pedesaan dan di perkotaan. Penduduk di pedesaan lebih banyak yang bekerja dengan jumlah jam kerja kurang dari 35 jam seminggu dibandingkan penduduk perkotaan.

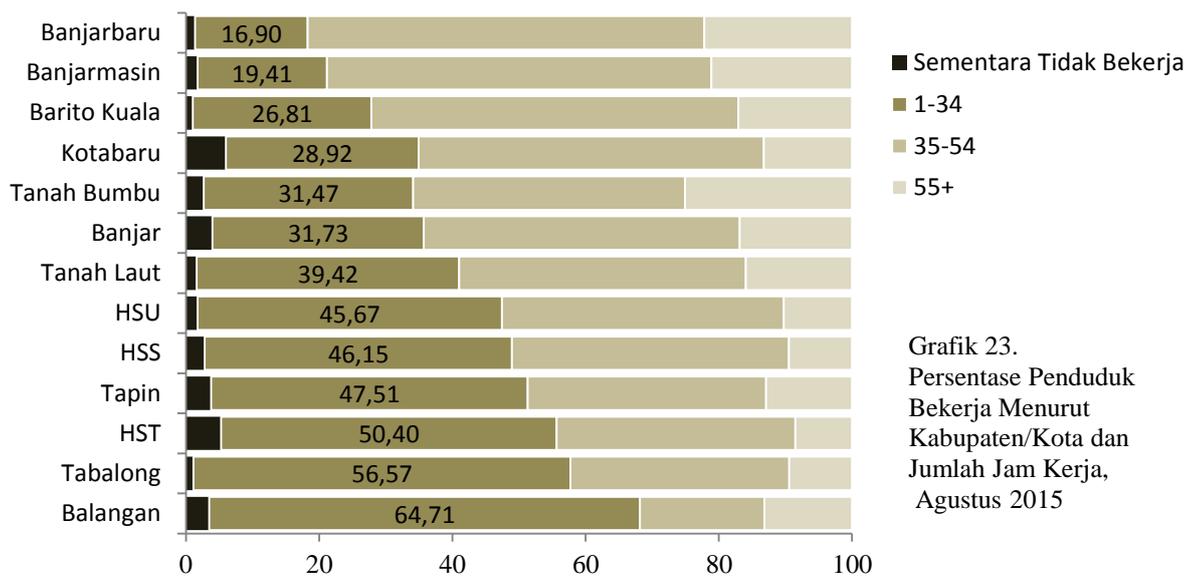
Grafik 22.
Persentase Penduduk Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja dan Daerah Tempat Tinggal, Agustus 2013-2015



Sekitar 43,65 persen penduduk pedesaan bekerja kurang dari 35 jam seminggu. Sedangkan untuk penduduk bekerja di daerah perkotaan sekitar 73,55 persen memiliki jam kerja lebih dari 35 jam selama seminggu.

64,71% penduduk Kabupaten Balangan bekerja kurang dari 35 jam seminggu

Menurut kabupaten/kota di Kalimantan Selatan maka persentase penduduk bekerja dengan jam kerja kurang dari 35 jam seminggu tertinggi terdapat di Kabupaten Balangan (64,71 persen), Tabalong (56,57 persen) dan Hulu Sungai Tengah (50,40 persen). Kota Banjarbaru dan Banjarmasin adalah kabupaten/kota dengan persentase penduduk bekerja kurang dari 35 jam seminggu yang terendah, yaitu sebesar 16,90 persen dan 19,41 persen.



Grafik 23.
 Persentase Penduduk Bekerja Menurut Kabupaten/Kota dan Jumlah Jam Kerja, Agustus 2015

<http://kalsel.bps.go.id>

BAB III
INDIKATOR PENGANGGURAN

KILM 8. PENGANGGURAN

TPT Kalimantan Selatan berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2015 mencapai 4,92 persen. Indikator ini menunjukkan bahwa dari 100 orang angkatan kerja di Kalimantan Selatan, terdapat sebanyak 5 orang yang masuk kategori penganggur. Selama periode Agustus 2013-Agustus 2015 TPT Provinsi Kalimantan Selatan memiliki kecenderungan tidak mengalami perubahan yang nyata. Walaupun secara nilai indikator TPT menunjukkan kenaikan tetapi masih dalam kelompok TPT yang rendah. TPT Agustus 2015 mengalami kenaikan masing-masing sebesar 1,12 poin bila dibandingkan dengan Agustus 2014 (3,80 persen) dan 1,26 poin dibandingkan Agustus 2013 (3,66 persen).

Tingkat Pengangguran Terbuka di Kalimantan Selatan sebesar 4,92%

Tabel 3. Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen), Agustus 2013 - 2015

Tingkat Pengangguran Terbuka	Agustus 2013	Agustus 2014	Agustus 2015
(1)	(2)	(3)	(4)
Kalimantan Selatan	3,66	3,80	4,92
Laki-laki	3,78	3,94	4,93
Perempuan	3,46	3,56	4,90
Perkotaan	5,00	5,33	6,65
Perdesaan	2,79	2,78	3,59

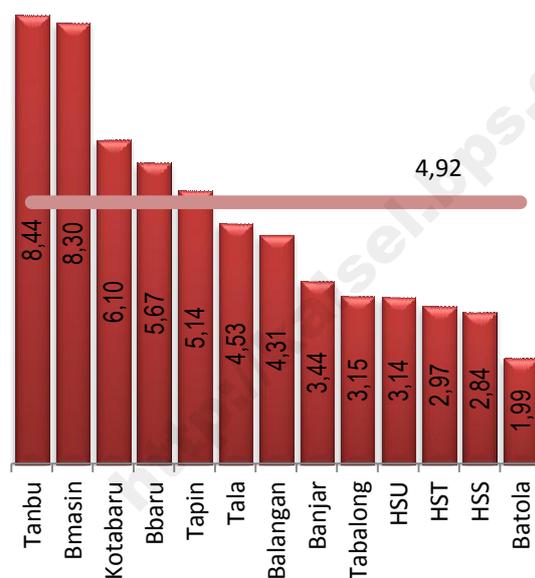
TPT menurut jenis kelamin juga menunjukkan pola yang serupa, yaitu peningkatan nilai indikator TPT baik pada laki-laki maupun perempuan. TPT perempuan keadaan Agustus 2015 mengalami kenaikan dibandingkan Agustus 2014 dan Agustus 2013 masing-masing sebesar 1,34 poin dan 1,44 poin. Sementara TPT penduduk laki-laki juga mengalami kenaikan masing-masing sebesar 0,99 poin dan 1,15 poin. Berdasarkan wilayah tempat tinggal, untuk wilayah perkotaan dan perdesaan juga menunjukkan pola

kecenderungan yang sama dengan TPT provinsi. TPT perkotaan keadaan Agustus 2015 adalah sebesar 6,65 persen. Angka ini hampir dua kali lebih besar dibandingkan TPT perdesaan yang sebesar 3,59 persen. Selama dua tahun terakhir nilai TPT daerah perkotaan mengalami kenaikan sebesar 1,32 poin dan 1,65 poin. Walaupun terjadi peningkatan TPT wilayah perdesaan, namun kenaikannya lebih rendah dibandingkan TPT perkotaan, yaitu hanya sebesar 0,80 poin dan 0,81 poin.

TPT tertinggi di Kabupaten Tanah Bumbu sebesar 8,84%

TPT tertinggi menurut kabupaten/kota keadaan Agustus 2015 terjadi di Kabupaten Tanah Bumbu (8,84 persen), Kota Banjarmasin (8,30 persen), dan Kabupaten Kotabaru (6,10 persen).

Untuk kabupaten/kota dengan nilai TPT terendah Agustus 2015 adalah Kabupaten Barito Kuala dan Hulu Sungai Selatan dengan nilai TPT masing-masing sebesar 1,99 persen dan 2,84 persen.



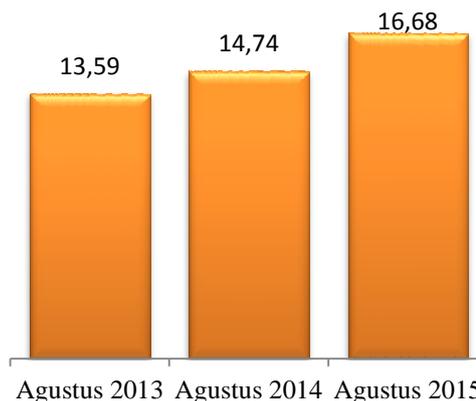
Grafik 24.
Tingkat Pengangguran
Terbuka Menurut
Kabupaten/Kota (Persen),
Agustus 2015

KILM 9. PENGANGGURAN PADA KELOMPOK UMUR MUDA

Penganggur pada kelompok umur muda merupakan masalah kebijakan yang penting bagi banyak negara yang tidak dapat dipisahkan dari proses pembangunan. Untuk tujuan indikator ini, istilah "umur muda" mencakup orang yang berumur 15 sampai 24 tahun, sedangkan "orang dewasa" didefinisikan sebagai orang yang berumur 25 tahun ke atas. Indikator pengangguran kaum muda disajikan dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Tingkat pengangguran kaum muda;
- 2) Tingkat pengangguran kaum muda sebagai persentase dari tingkat pengangguran dewasa;
- 3) *Share* pengangguran kaum muda terhadap total penganggur;
- 4) Pengangguran kaum muda sebagai proporsi dari populasi kaum muda.

TPT penduduk pada kelompok umur muda yaitu 15-24 tahun keadaan Agustus 2015 mencapai 16,68 persen. Angka ini mengindikasikan bahwa dari 100 orang angkatan kerja berumur 15–24 tahun, terdapat sekitar 17 orang yang menganggur. TPT penduduk kelompok umur menunjukkan kecenderungan mengalami kenaikan dalam kurun waktu dua tahun terakhir. Dibandingkan hasil Sakernas Agustus 2013 terjadi kenaikan sebesar 3,09 poin.



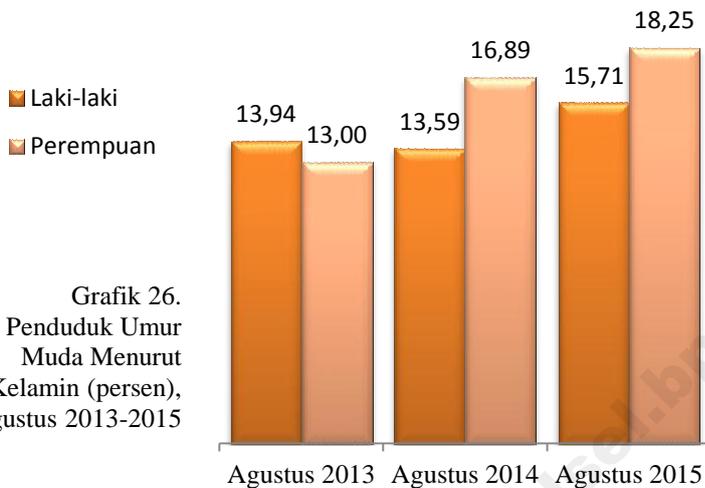
TPT kelompok umur muda relatif tinggi

Grafik 25.
TPT Penduduk Umur Muda (persen), Agustus 2013-2015

Untuk umur muda, TPT perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki

Agustus 2014 menjadi titik balik lebih tingginya TPT penduduk perempuan umur muda dibandingkan TPT penduduk laki-laki umur muda. Pada Agustus 2013 tidak ada perbedaan yang mencolok antara TPT penduduk laki-laki berumur muda (13,94 persen) dibandingkan TPT perempuan berumur muda (13,00 persen). Pada Agustus 2014 terjadi peningkatan sebesar 3,89 poin untuk TPT penduduk perempuan umur muda. Dengan tidak adanya perubahan yang nyata pada TPT laki-laki umur muda maka terdapat selisih

(*gap*) menurut jenis kelamin sebesar 3,30 poin di periode tersebut. Sejak Agustus 2013 hingga Agustus 2015 terjadi peningkatan TPT penduduk umur muda laki-laki dan perempuan masing-masing sebesar 1,77 poin dan 5,25 poin.

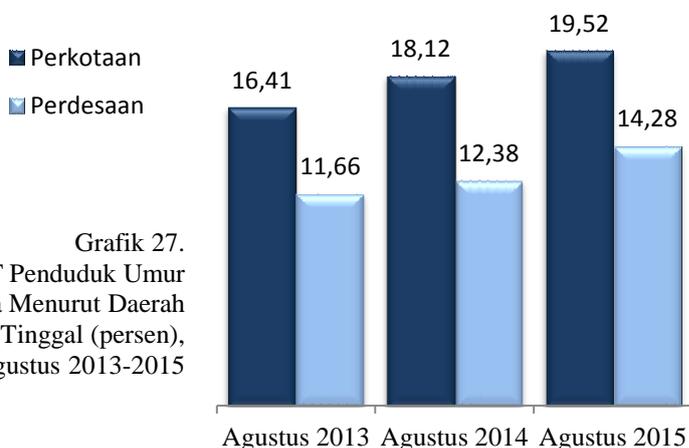


Grafik 26. TPT Penduduk Umur Muda Menurut Jenis Kelamin (persen), Agustus 2013-2015

TPT kelompok umur muda di perkotaan lebih tinggi dibandingkan pedesaan

Berdasarkan klasifikasi daerah tempat tinggal, pada kelompok umur muda memperlihatkan bahwa pola TPT daerah perkotaan lebih tinggi daripada di daerah pedesaan. Pada Agustus 2015, TPT daerah perkotaan mencapai 19,52 persen, sementara di daerah pedesaan sebesar 14,39 persen. Hal tersebut bisa diartikan bahwa

dari 100 penduduk usia 15-24 tahun yang termasuk angkatan kerja, untuk daerah perkotaan terdapat 20 orang yang menganggur, sementara untuk daerah pedesaan hanya 14 orang.



Grafik 27. TPT Penduduk Umur Muda Menurut Daerah Tempat Tinggal (persen), Agustus 2013-2015

Rasio antara TPT penduduk umur muda terhadap TPT penduduk dewasa pada Agustus 2015 adalah sebesar 6,69 persen. Hal ini menunjukkan bahwa proporsi penduduk umur muda hampir tujuh kali lebih besar menjadi penganggur dibandingkan penduduk dewasa. Walaupun angka rasio ini sangat tinggi namun dibandingkan kondisi dua tahun terakhir terjadi penurunan. Rasio TPT penduduk umur muda mencapai 9 kali lebih tinggi dibandingkan TPT penduduk usia dewasa keadaan Agustus 2014.

TPT penduduk umur muda tujuh kali lipat lebih tinggi daripada TPT dewasa

Tabel 4. Rasio TPT Penduduk Muda Terhadap TPT Dewasa (Persen), Agustus 2013 - 2015

Rasio TPT Penduduk Muda Terhadap TPT Dewasa	Agustus 2013	Agustus 2014	Agustus 2015
(1)	(2)	(3)	(4)
Kalimantan Selatan	8,69	9,13	6,69
Laki-laki	8,83	7,13	5,79
Perempuan	8,44	14,66	8,52
Perkotaan	6,58	6,77	5,12
Perdesaan	12,05	13,48	9,49

Penurunan rasio antar TPT yang dibedakan menurut kelompok usia ini terjadi di semua kategori, yaitu menurut jenis kelamin dan daerah tempat tinggal. Menurut jenis kelamin, penurunan rasio tertinggi terjadi pada penduduk perempuan. Rasio TPT Penduduk perempuan lebih berfluktuatif dibandingkan penduduk laki-laki. Pada Agustus 2015, rasio TPT perempuan berumur muda mengalami penurunan hampir setengah dari kondisi Agustus 2014. Angka ini tidak jauh berbeda dibandingkan kondisi Agustus 2013. Keteraturan pola lebih terlihat pada rasio penduduk laki-laki. Secara konsisten terjadi penurunan sebesar 1,70 poin dan 1,34 setiap tahunnya.

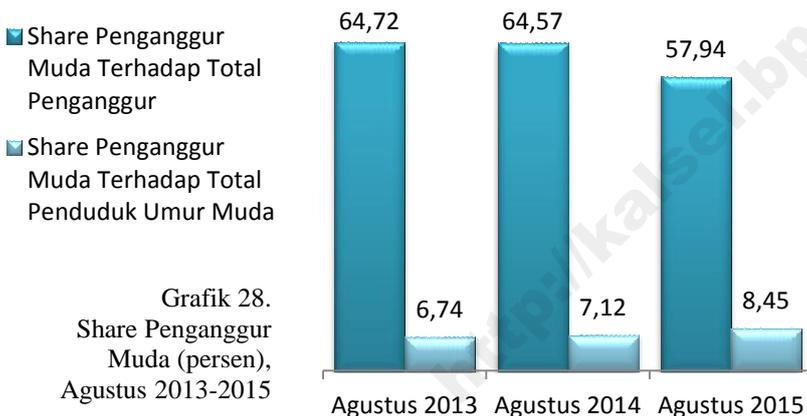
Menurut kategori wilayah tempat tinggal, penurunan rasio antara TPT penduduk perdesaan umur muda lebih tinggi yang mencapai

3,99 poin dibandingkan penurunan wilayah perkotaan yang sebesar 1,65 poin dalam setahun terakhir.

Share penganggur umur muda terhadap total penganggur 57,94 persen

Share penganggur umur muda terhadap total penganggur berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2015 sangat tinggi yaitu 57,94. Angka ini dapat diartikan bahwa pada Agustus 2015, dari 100 orang penganggur terdapat sejumlah 58 orang penganggur berumur antara 15 sampai 24 tahun. Angka ini mengalami penurunan sebesar 6,63 poin dibandingkan keadaan Agustus 2014. Angka penurunan ini searah dengan penurunan yang terjadi antara kondisi Agustus 2014 sebesar 0,15 poin dibandingkan Agustus 2013.

Perlu menjadi perhatian adalah terjadinya peningkatan share penganggur penduduk umur muda terhadap total penduduk umur muda. Sejak Agustus 2013 setiap tahunnya terjadi peningkatan sebesar 0,38 poin dan 1,33 poin sehingga share penganggur muda terhadap total penduduk umur muda pada Agustus 2014 sebesar 7,12 persen dan 8,45 persen pada kondisi Agustus 2015.



Grafik 28. Share Penganggur Muda (persen), Agustus 2013-2015

KILM 11. PENGANGGURAN DAN PENDIDIKAN

Indikator ini bertujuan untuk melihat hubungan antara pencapaian pendidikan penduduk yang bekerja dan pengangguran. Hal ini dapat memberikan gambaran mengenai perubahan dalam permintaan tenaga kerja. Informasi yang diberikan dapat memiliki implikasi penting bagi penduduk yang bekerja dan kebijakan pendidikan. Jika diketahui bahwa orang dengan tingkat pendidikan yang rendah berada pada risiko yang lebih tinggi menjadi pengangguran, kebijakan yang mungkin adalah meningkatkan tingkat pendidikan mereka atau menciptakan lebih banyak

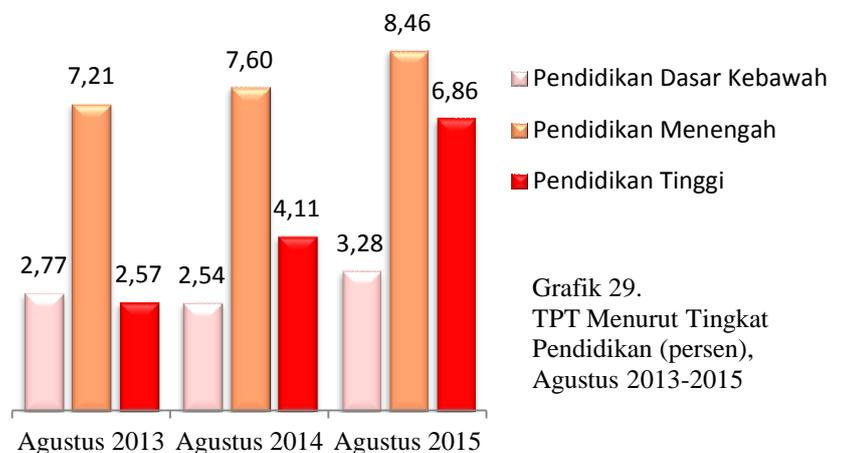
pekerjaan dengan keterampilan rendah (*low skilled job*) di dalam negeri. Selain itu, apabila *share* pengangguran yang lebih tinggi di kalangan orang-orang dengan pendidikan tinggi bisa menunjukkan kurangnya pekerjaan teknis yang profesional dan tingkat tinggi.

Indikator TPT dalam pembahasan ini dikelompokkan menurut tingkat pendidikan yaitu :

- 1) Pendidikan Dasar Kebawah, adalah mereka yang menyelesaikan pendidikan tertingginya pada jenjang SLTP atau sederajat. Termasuk mereka yang tidak pernah sekolah atau tidak menyelesaikan pendidikan pada jenjang pendidikan sekolah dasar dan SLTP;
- 2) Pendidikan Menengah, adalah mereka yang menyelesaikan pendidikan tertingginya adalah SLTA atau sederajat;
- 3) Pendidikan Tinggi, adalah mereka yang telah menyelesaikan pendidikan pada jenjang diploma dan strata 1, atau lebih.

Secara umum, berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2015, TPT tertinggi menurut tingkat pendidikan terdapat pada pendidikan menengah yaitu sebesar 8,46 persen. Fenomena rendahnya TPT di jenjang pendidikan dasar ke bawah (3,28 persen) umumnya terjadi di negara berkembang yang belum mampu memberikan jaminan sosial dan tunjangan pendapatan untuk seluruh warga negaranya. Hal ini memaksa seseorang dengan pendidikan rendah untuk melakukan pekerjaan tanpa memprioritaskan kualitas pekerjaan dan besaran balas jasa yang diperoleh.

TPT tertinggi terjadi pada penduduk berpendidikan menengah



Grafik 29. TPT Menurut Tingkat Pendidikan (persen), Agustus 2013-2015

Peningkatan TPT terutama pada penganggur berpendidikan tinggi

Sejalan dengan TPT provinsi yang cenderung mengalami peningkatan selama periode Agustus 2014 - Agustus 2015, peningkatan TPT terbesar menurut pendidikan terjadi pada pendidikan tinggi, yaitu sebesar 2,75 poin. Secara umum terjadi kenaikan TPT pada jenjang pendidikan lainnya, yaitu sebesar 0,74 poin untuk pendidikan dasar ke bawah dan sebesar 0,86 poin untuk jenjang pendidikan menengah

Tabel 5. Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Tingkat Pendidikan (Persen), Agustus 2013 - 2015

Tingkat Pendidikan	Agustus 2013	Agustus 2014	Agustus 2015
(1)	(2)	(3)	(4)
Total	3,66	3,80	4,92
Pendidikan Dasar Kebawah	2,77	2,54	3,28
Laki-laki	3,16	3,03	3,73
Perempuan	2,14	1,78	2,57
Perkotaan	4,79	4,61	5,37
Perdesaan	1,91	1,69	2,32
Pendidikan Menengah	7,21	7,60	8,46
Laki-laki	5,97	6,47	7,18
Perempuan	9,64	9,97	11,05
Perkotaan	6,35	7,10	7,99
Perdesaan	8,49	8,34	9,20
Pendidikan Tinggi	2,57	4,11	6,86
Laki-laki	3,29	4,10	6,88
Perempuan	1,65	4,11	6,84
Perkotaan	3,02	3,96	7,42
Perdesaan	1,58	4,50	5,21

Berdasarkan jenis kelamin, peningkatan TPT pada tingkat pendidikan tinggi keadaan Agustus 2015 dibandingkan Agustus 2014 terjadi secara berimbang antara penduduk laki-laki (2,78 poin) dan penduduk perempuan (2,73 poin). Perbedaan kenaikan TPT lebih terlihat berdasarkan wilayah tempat tinggal. Peningkatan

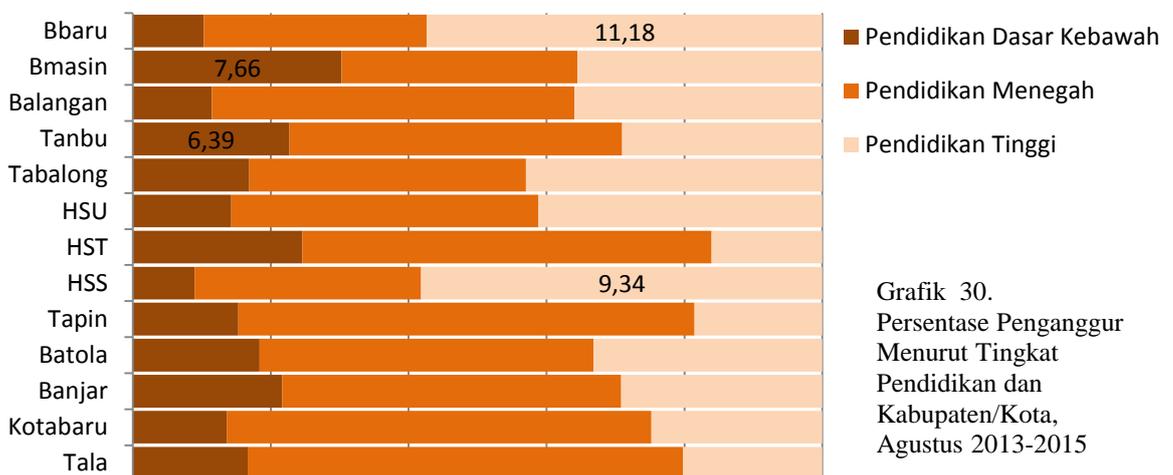
TPT pada tingkat pendidikan tinggi di perkotaan jauh lebih tinggi dibandingkan wilayah perdesaan, dengan nilai kenaikan masing-masing sebesar 3,46 poin dan 0,71 poin.

Selama Agustus 2013 – Agustus 2015, TPT perempuan merupakan yang tertinggi jika dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan jenjang pendidikan yang ditamatkan. Agustus 2013 tercatat TPT perempuan kelompok pendidikan menengah ini adalah sebesar 9,64 persen. Bahkan pada Agustus 2015 tercatat sekitar 11,05 persen dari angkatan kerja perempuan adalah pengangguran. Besarnya TPT perempuan berpendidikan menengah adalah semakin berkurangnya daya serap pasar kerja terhadap perempuan yang memiliki prioritas memilih pendidikan di jenjang menengah kejuruan. Alasan lainnya adalah prioritas keluarga yang cenderung untuk menyekolahkan anak laki-laki ke jenjang pendidikan tinggi dibandingkan anak perempuan. Hal ini dapat dilihat adanya selisih TPT laki-laki dan perempuan di jenjang pendidikan menengah sebesar 3,87 poin.

TPT perempuan tertinggi di kelompok berpendidikan menengah

Menurut kabupaten/kota maka TPT tertinggi untuk penganggur berpendidikan dasar kebawah adalah Kota Banjarmasin (7,66 persen) dan Kabupaten Tanah Bumbu (6,39 persen). Sedangkan TPT tertinggi untuk penganggur berpendidikan tinggi adalah Kota Banjarbaru (11,18 persen) dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan (9,34 persen).

TPT tertinggi penganggur berpendidikan tinggi adalah Kota Banjarbaru



Grafik 30. Persentase Penganggur Menurut Tingkat Pendidikan dan Kabupaten/Kota, Agustus 2013-2015

KILM 12. SETENGAH PENGANGGUR (UNDEREMPLOYMENT)

Fenomena yang sering ditemui mengenai indikator ketenagakerjaan di daerah yang sedang berkembang adalah tingkat pengangguran terbuka yang rendah tetapi terjadi angka setengah penganggur yang cukup tinggi. Setengah penganggur adalah pekerja dengan jumlah jam kerja kurang dari jumlah jam kerja normal (35 jam seminggu), dan mereka masih mencari atau bersedia menerima pekerjaan tambahan.

**156,3 ribu
orang
setengah
penganggur
di Kalimantan
Selatan**

Jumlah setengah penganggur di Kalimantan Selatan kondisi Agustus 2015 mencapai 156,3 ribu orang. Pada umumnya setengah penganggur lebih banyak terjadi di kalangan pekerja laki-laki dan juga pekerja daerah perdesaan. Menurut jenis kelamin terdapat kurang lebih sekitar 99,7 ribu orang pekerja laki-laki dan 56,6 ribu orang pekerja perempuan termasuk dalam kelompok setengah penganggur. Sedangkan menurut klasifikasi wilayah tempat tinggal maka sekitar sepertiganya bertempat tinggal di perkotaan yaitu mencapai 46,9 ribu orang. Dibandingkan wilayah perkotaan, jumlah setengah penganggur jauh lebih besar terjadi di wilayah perdesaan yang mencapai 109,4 ribu orang.

Tabel 6. Jumlah Setengah Pengangguran, Agustus 2013 – 2015 (Ribu Jiwa)

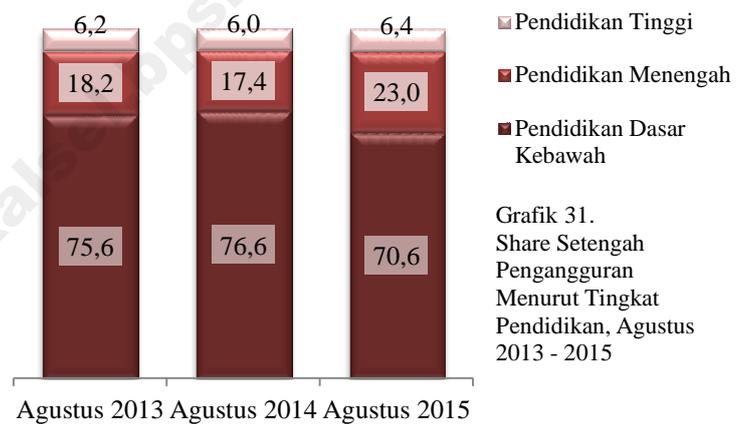
Setengah Pengangguran	Agustus 2013	Agustus 2014	Agustus 2015
(1)	(2)	(3)	(4)
Kalimantan Selatan	154,4	139,5	156,3
Laki-laki	99,2	91,2	99,7
Perempuan	55,2	48,3	56,6
Perkotaan	47,1	42,0	46,9
Perdesaan	107,3	97,5	109,4

Selama setahun terakhir terjadi kenaikan jumlah setengah penganggur sebanyak 16,8 ribu orang. Kenaikan terbesar terjadi di daerah perdesaan yang mencapai 11,9 ribu orang. Jumlah ini dua kali lebih besar dibandingkan kenaikan setengah penganggur

perkotaan yang kenaikannya sebesar 4,9 ribu orang. Berdasarkan jenis kelamin tidak terdapat perbedaan yang nyata antara kenaikan setengah penganggur laki-laki dan perempuan. Pertambahan setengah penganggur laki-laki sebesar 8,5 ribu orang dan perempuan 8,3 ribu orang.

Share setengah penganggur tertinggi terdapat pada tingkat pendidikan dasar ke bawah yaitu sebesar 70,6 persen. Artinya pada kondisi Agustus 2015 diperkirakan bahwa dari 100 orang setengah penganggur 71 orang diantaranya adalah berpendidikan dasar kebawah. Jika dibandingkan dengan kondisi Agustus 2014 terjadi penurunan share setengah penganggur pada tingkat sekolah dasar ke bawah yaitu sebesar 6 poin. Kondisi ini sebenarnya hanyalah pergeseran ke pendidikan menengah. Setengah penganggur berpendidikan menengah mengalami sedikit kenaikan sebesar 5,6 poin menjadi 23,0 persen pada kondisi Agustus 2015. Selama dua tahun terakhir, share setengah penganggur yang berpendidikan minimal diploma berada pada kisaran 6 persen.

93,6%
setengah
penganggur
berpendidikan
menengah ke
bawah



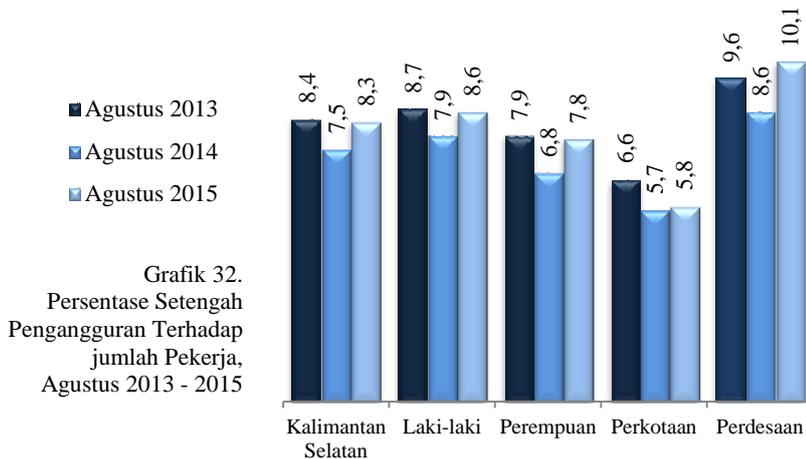
Grafik 31.
Share Setengah Pengangguran Menurut Tingkat Pendidikan, Agustus 2013 - 2015

Persentase setengah penganggur terhadap jumlah penduduk bekerja pada Agustus 2015 adalah 8,3 persen. Artinya dari 100 orang pekerja terdapat sekitar 8 orang yang bekerja dengan jumlah jam kerja kurang dari 35 jam seminggu dan mereka masih mencari pekerjaan atau bersedia menerima pekerjaan lainnya.

Selama dua tahun terakhir pola persentase setengah penganggur terhadap jumlah penduduk bekerja cenderung tidak mengalami perubahan. Pada kondisi Agustus 2013 persentase setengah

penganggur sebesar 8,4 persen. Hanya terdapat selisih sebesar 0,1 poin terhadap kondisi Agustus 2015.

Kondisi serupa juga ditemui untuk persentase setengah penganggur yang dibedakan menurut jenis kelamin. Walaupun besaran

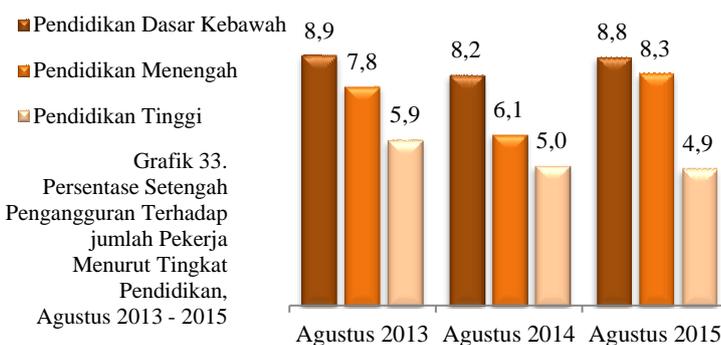


indikator ini mengalami kenaikan masing-masing untuk setengah penganggur laki-laki (0,7 poin) dan setengah penganggur perempuan (1,0 poin) tetapi tidak berbeda dibandingkan kondisi Agustus 2013.

Pergeseran persentase setengah pengangguran terlihat ketika ditinjau dari aspek klasifikasi wilayah tempat tinggal. Pada Agustus 2015, persentase setengah penganggur di perdesaan mencapai 10,1 persen. Jumlah ini dua kali lebih besar dibandingkan setengah penganggur di wilayah perkotaan yang sebesar 5,8 persen.

Persentase setengah penganggur tertinggi pada tingkat pendidikan dasar ke bawah

Persentase tertinggi untuk setengah penganggur terhadap total penduduk pekerja adalah pada tingkat pendidikan dasar ke bawah yaitu sebesar 8,8 persen. Angka ini menunjukkan bahwa terdapat sekitar 9 orang setengah penganggur dari 100 orang yang bekerja dengan jenjang tertinggi yang ditamatkan adalah SLTP.



Seiring meningkatnya pendidikan pekerja, maka indikator ini juga mulai mengalami penurunan. Persentase setengah pengangguran pendidikan menengah mengalami

kenaikan sebesar 2,2 poin dibandingkan Agustus 2014 menjadi 8,3 persen. Untuk setengah penganggur yang berpendidikan tinggi selama dua tahun terakhir tidak mengalami perubahan. Dari 100 pekerja berpendidikan tinggi terdapat sekitar 5 orangnya adalah setengah pengangguran.

KILM 13. TINGKAT KETIDAKAKTIFAN

Penduduk bukan angkatan kerja adalah mereka yang tidak bekerja dan tidak menginginkan pekerjaan serta hanya melakukan kegiatan non ekonomi, seperti bersekolah, mengurus rumah tangga dan kegiatan lainnya. Suatu daerah atau kondisi sosial dan ekonomi yang lebih baik berkecenderungan memiliki tingkat ketidakaktifan lebih tinggi. Hal ini tidak memaksa penduduk atau kelompok tertentu untuk terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi.

Tingkat ketidakaktifan di Kalimantan Selatan pada kondisi Agustus 2015 adalah 30,27 persen. Indikator ini menunjukkan bahwa terdapat 30 orang dari 100 orang penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) di Kalimantan Selatan tidak terlibat dan tidak ingin terlibat dalam kegiatan ekonomi (pasar kerja).

***Tingkat
ketidakaktifan
Agustus 2015
30,27 persen***

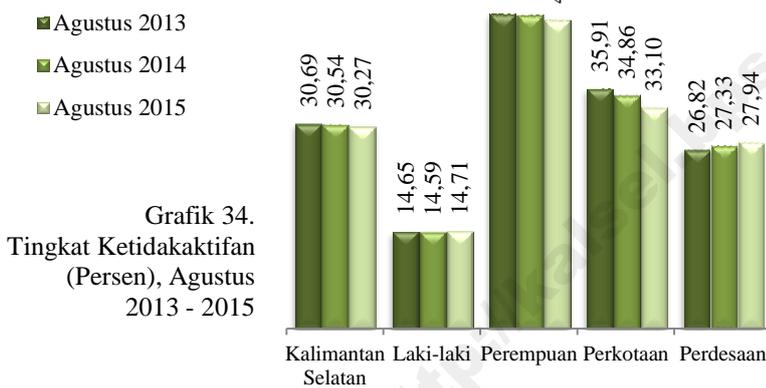
Tingkat ketidakaktifan selama dua tahun terakhir tidak mengalami perubahan yang nyata. Tercatat tingkat ketidakaktifan pada Agustus 2013 dan Agustus 2014 adalah sebesar 30,69 persen dan 30,53 persen. Atau hanya mengalami perubahan masing-masing sebesar 0,15 poin dan 0,27 poin setiap tahunnya.

Ditinjau berdasarkan jenis kelamin, menunjukkan bahwa Kalimantan Selatan masih menganut pola patriarki. Hal ini dibuktikan terdapat perbedaan yang cukup besar antara tingkat ketidakaktifan penduduk laki-laki dibandingkan penduduk perempuan. Hasil Sakernas Agustus 2015 menunjukkan bahwa dari 100 orang penduduk laki-laki usia kerja, terdapat sebanyak 15 orang yang tidak aktif dalam pasar kerja. Jumlah ini meningkat menjadi tiga kali lebih tinggi yaitu sebanyak 46 orang untuk

penduduk perempuan. Tingkat ketidakaktifan penduduk laki-laki dan perempuan tidak mengalami perubahan selama dua tahun terakhir.

Berdasarkan klasifikasi tempat tinggal, tingkat ketidakaktifan untuk daerah perkotaan lebih tinggi dibandingkan di perdesaan. Pada Agustus 2015 tingkat ketidakaktifan di perkotaan mencapai 33,10 persen, sementara di daerah perdesaan hanya sebesar 27,94 persen. Walaupun dalam jangka waktu singkat perubahan tidak terlalu nyata, namun terdapat arah perubahan yang berbeda untuk daerah perkotaan dan perdesaan. Sejak Agustus 2013, tingkat ketidakaktifan penduduk perkotaan menunjukkan pola penurunan

sebesar 1,05 poin dan 1,76 poin setiap tahunnya. Arah yang berbeda ditunjukkan oleh tingkat ketidakaktifan di perdesaan cenderung meningkat dengan perubahan sebesar 0,51 poin dan 0,61 poin setiap tahunnya.

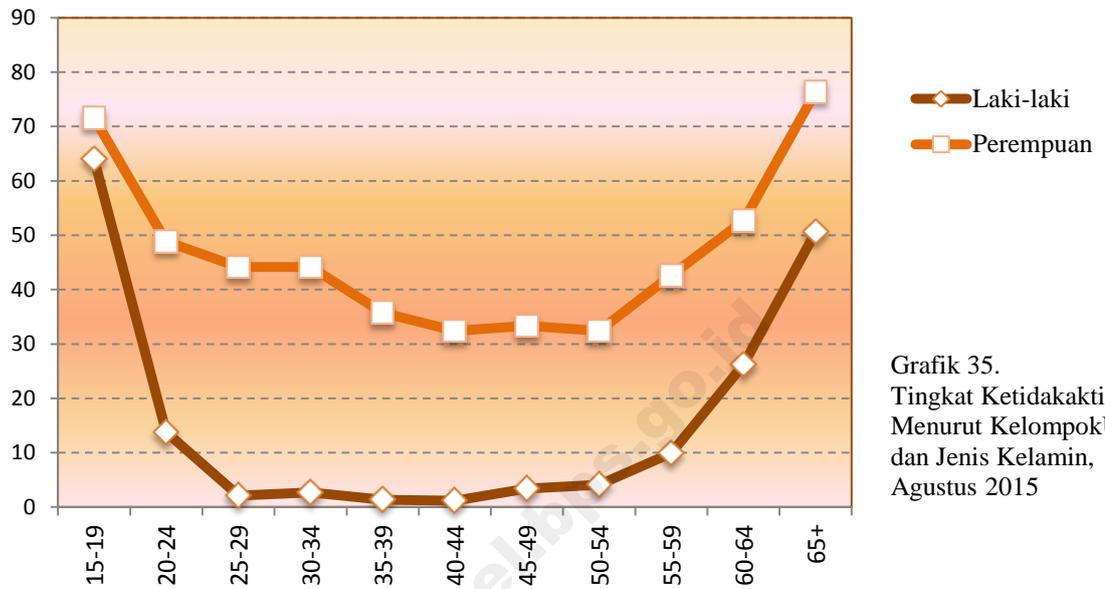


Tingkat ketidakaktifan rendah pada kelompok 25 – 54 tahun

Grafik ketidakaktifan menurut kelompok umur membentuk kurva “U”. Pada penduduk umur muda, tingkat ketidakaktifan sangat tinggi. Memasuki usia dewasa terjadi penurunan tingkat ketidakaktifan secara drastis. Seiring bertambah usia, tingkat ketidakaktifan kembali meningkat pada usia 55 tahun ke atas.

Tingkat ketidakaktifan penduduk laki-laki pada kelompok umur 15–19 tahun mencapai 63,98 persen. Tingkat ketidakaktifan kemudian terus mengalami penurunan hingga mencapai titik terendah pada kelompok umur 40–44 tahun sebesar 1,19 persen, Selanjutnya tingkat ketidakaktifan kembali meningkat seiring pertambahan usia.

Kondisi serupa juga ditemui pada penduduk perempuan. Pada kelompok umur 15–19 tahun tingkat ketidakaktifan sebesar 71,59 persen. Selanjutnya tingkat ketidakaktifan terendah penduduk perempuan adalah pada kelompok umur 40-44 tahun yang sebesar 32,38 persen.



Grafik 35.
Tingkat Ketidakaktifan Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, Agustus 2015

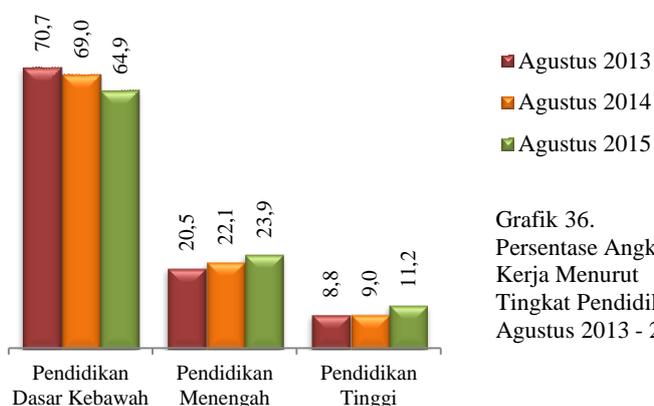
BAB IV

INDIKATOR PENDIDIKAN DAN MELEK HURUF

KILM 14. PENCAPAIAN PENDIDIKAN DAN MELEK HURUF

Informasi mengenai tingkat pencapaian pendidikan saat ini adalah indikator terbaik yang tersedia untuk melihat tingkat keahlian tenaga kerja. Tingkat keahlian tenaga kerja merupakan faktor penentu kemampuan suatu daerah untuk mampu bersaing di pasar dunia dan membuat efisiensi penggunaan kemajuan teknologi yang cepat. KILM 14 menyajikan informasi mengenai tingkat pendidikan angkatan kerja sesuai dengan lima tingkat pendidikan yaitu kurang dari satu tahun, tingkat pradasar, tingkat dasar, tingkat menengah, dan tingkat tersier. Kategori yang digunakan dalam indikator ini secara konseptual berdasarkan tingkat *International Standard Classification of Education (ISCED)*. Akan tetapi, Sakernas tidak menyediakan data mengenai kemampuan baca-tulis (melek huruf) penduduk yang bekerja. Sebagai pendekatan untuk mengidentifikasi tingkat literasi (melek huruf) digunakan jenjang pendidikan yang ditamatkan.

Komposisi angkatan kerja menurut tingkat pendidikan pada keadaan Agustus 2015 tidak menunjukkan perubahan yang nyata dibandingkan Keadaan Agustus 2014. Angkatan kerja dengan tingkat pendidikan dasar ke bawah masih memiliki kontribusi terbesar yaitu 64,9 persen. Kontribusi angkatan kerja menurut tingkat pendidikan berkurang seiring meningkatnya jenjang pendidikan yang diselesaikan. Tercatat angkatan kerja yang telah menyelesaikan jenjang pendidikan menengah sebesar 23,9 persen dan pendidikan tinggi sebesar 11,2 persen.



64,89 persen angkatan kerja berpendidikan dasar kebawah

Grafik 36.
Persentase Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan, Agustus 2013 - 2015

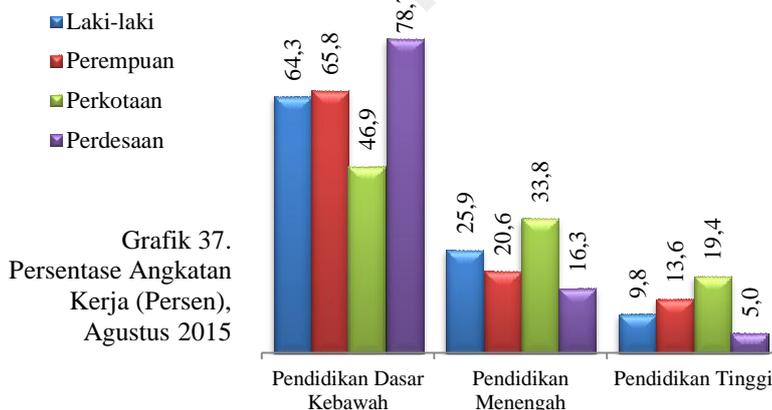
Selama dua tahun terakhir menunjukkan pola semakin berkurangnya persentase angkatan kerja yang berpendidikan rendah yang bergeser menjadi angkatan kerja yang berpendidikan lebih tinggi.

Persentase angkatan kerja berpendidikan tinggi di perkotaan empat kali lebih tinggi dibandingkan pedesaan

Menurut jenis kelamin terdapat sedikit perbedaan terutama untuk jenjang pendidikan menengah dan tinggi. Persentase angkatan kerja laki-laki yang telah menyelesaikan pendidikan jenjang SLTA adalah 25,9 persen. Besaran ini berbeda sebesar 5,3 poin dibandingkan penduduk perempuan pada kondisi Agustus 2015. Tetapi pada kelompok angkatan kerja berpendidikan tinggi terjadi hal sebaliknya. Angkatan kerja penduduk perempuan pada jenjang pendidikan tinggi sebesar 13,6 persen. Angka ini lebih tinggi sebanyak 3,8 poin dibandingkan persentase angkatan kerja laki-laki berpendidikan tinggi yang sebesar 9,6 persen.

Kesenjangan kualitas pendidikan angkatan kerja terlihat sangat besar ketika ditinjau dari aspek wilayah tempat tinggal. Kurang dari setengah jumlah angkatan kerja di perkotaan adalah mereka yang berpendidikan dasar ke bawah. Angka ini jauh lebih tinggi di daerah pedesaan yaitu mencapai 78,7 persen. Kesenjangan juga terlihat pada pendidikan yang ditamatkan oleh angkatan kerja untuk jenjang menengah dan tinggi. Hanya sekitar 5,0 persen dari

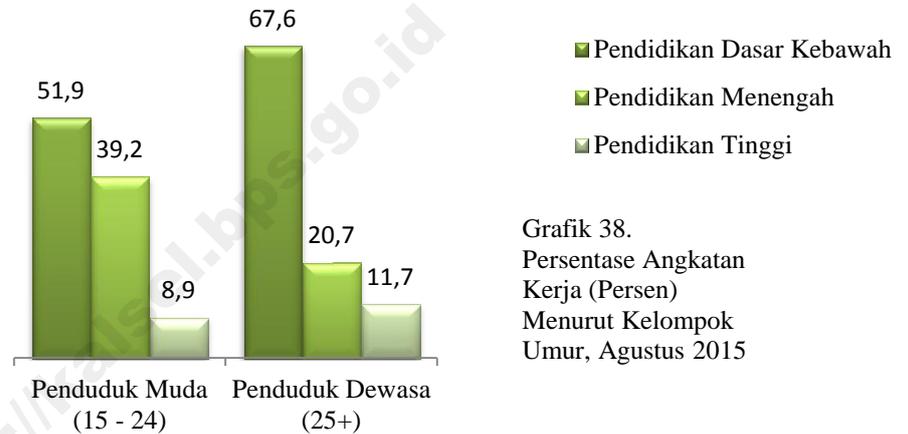
angkatan kerja di daerah pedesaan yang telah berpendidikan tinggi. Angka ini melonjak empat kali lebih banyak untuk daerah perkotaan yang pada keadaan Agustus 2015 mencapai 19,4 persen.



Menurut kelompok umur muda dan dewasa menunjukkan bahwa tingginya angka persentase angkatan kerja yang berpendidikan dasar ke bawah dipengaruhi oleh penduduk usia dewasa. Persentase angkatan kerja dewasa yang berpendidikan dasar ke bawah sebesar 67,6 persen. Terdapat perbedaan yang cukup besar dibandingkan angkatan kerja muda berpendidikan dasar kebawah sebesar 51,9 persen. Gap antara kualitas angkatan kerja muda dengan angkatan kerja juga terlihat pada jenjang pendidikan menengah. Dari 100 orang angkatan kerja umur muda terdapat 39 orang yang telah menyelesaikan jenjang pendidikan menengah. Bandingkan dengan angkatan kerja dewasa, dimana hanya 21 orang yang berpendidikan menengah.

39,2 persen angkatan kerja penduduk umur muda berpendidikan menengah

Hal yang menunjukkan bahwa program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun secara perlahan telah meningkatkan kualitas angkatan kerja.

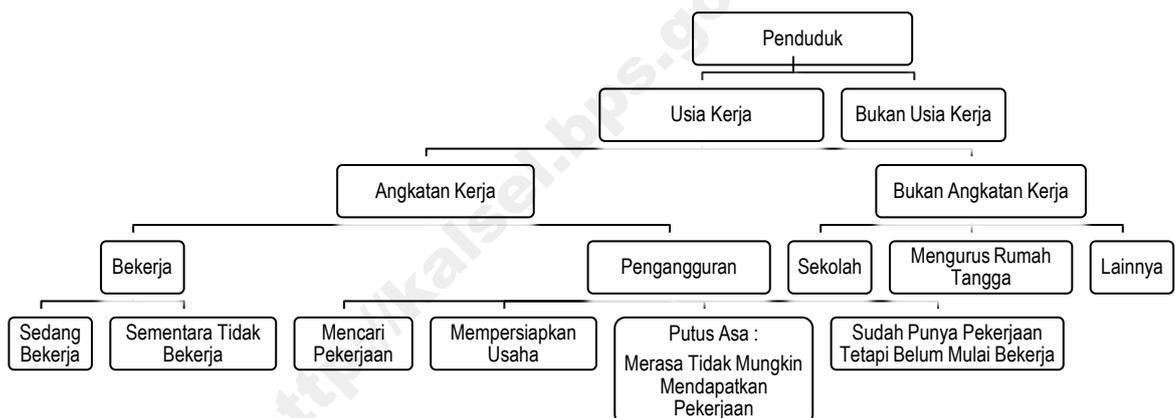


Grafik 38. Persentase Angkatan Kerja (Persen) Menurut Kelompok Umur, Agustus 2015

PENJELASAN TEKNIS

Konsep definisi ketenagakerjaan yang digunakan BPS merujuk pada rekomendasi ILO sebagaimana tercantum dalam buku “*Surveys of Economically Active Population, Employment, Unemployment and Under employment: An ILO Manual on Concepts and Methods*”, ILO 1992. Hal ini dimaksudkan, terutama agar data ketenagakerjaan yang dihasilkan dari berbagai survei di Indonesia dapat dibandingkan secara internasional, tanpa mengesampingkan kondisi ketenagakerjaan spesifik Indonesia.

Pendekatan teori ketenagakerjaan yang digunakan dalam Sakernas adalah Konsep Dasar Angkatan Kerja (*Standard Labor Force Concept*), seperti pada diagram dibawah ini:



Beberapa konsep umum yang digunakan dalam Sakernas yang juga diadopsi untuk penyusunan KILM, meliputi konsep dan definisi mengenai penduduk, umur kerja, angkatan kerja, bukan angkatan kerja, periode referensi, dan kriteria satu jam.

Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama enam bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Berdasarkan konsep dasar ketenagakerjaan, penduduk dikelompokkan menjadi penduduk umur kerja dan penduduk bukan umur kerja. Penduduk umur kerja dibedakan atas dua kelompok, yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Pengukurannya

didasarkan pada periode rujukan (*time reference*), yaitu kegiatan yang dilakukan selama seminggu yang lalu sampai sehari sebelum pencacahan.

Umur kerja adalah batas umur yang ditetapkan untuk pengelompokan penduduk yang aktif secara ekonomi. Indonesia menggunakan batas bawah umur kerja (*economically active population*) 15 tahun (meskipun dalam survei dikumpulkan informasi mulai dari umur 10 tahun) dan tanpa batas atas umur kerja. Di negara lain, penentuan batas bawah dan batas atas umur kerja bervariasi sesuai dengan kebutuhan/situasinya. Sebagai contoh, beberapa negara yang menggunakan batas bawah adalah Mesir (6 tahun), Brazil (10 tahun), Swedia, USA (16 tahun), Kanada (14 dan 15 tahun), India (5 dan 15 tahun), Venezuela (10 dan 15 tahun). Sementara itu, negara-negara yang menggunakan batas atas adalah Denmark, Swedia, Norwegia, Finlandia (74 tahun), Mesir, Malaysia, dan Mexico (65 tahun). Banyak negara seperti Indonesia tidak menggunakan batas atas.

Angkatan kerja terdiri dari penduduk yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Sedangkan bukan angkatan kerja terdiri dari penduduk yang pada periode rujukan tidak mempunyai/melakukan aktivitas ekonomi, baik karena sekolah, mengurus rumah tangga atau lainnya (olahraga, kursus, piknik, dan kegiatan sosial (berorganisasi, kerja bakti)).

Yang dimaksud dengan bekerja adalah kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan, paling sedikit selama satu jam dalam seminggu yang lalu. Bekerja selama satu jam tersebut harus dilakukan berturut-turut dan tidak terputus. Kegiatan bekerja ini mencakup, baik yang sedang bekerja maupun yang punya pekerjaan tetapi dalam seminggu yang lalu sementara tidak bekerja, misalnya karena cuti, sakit, dan sejenisnya. Konsep bekerja satu jam selama seminggu yang lalu juga digunakan oleh banyak negara, antara lain Pakistan, Filipina, Bulgaria, Hungaria, Polandia, Rumania, Federasi Rumania, dan lainnya. Penghasilan atau keuntungan mencakup upah/gaji/pendapatan, termasuk semua tunjangan dan bonus bagi buruh/ karyawan/pegawai dan hasil usaha berupa sewa, bunga, atau keuntungan, baik berupa uang atau barang bagi pengusaha. Kegiatan bekerja ini mencakup penduduk yang sedang bekerja maupun yang punya pekerjaan tetapi

dalam seminggu yang lalu sementara tidak aktif bekerja, misal karena sakit, cuti, menunggu panen, mogok kerja, tugas belajar, dan sejenisnya.

Pengangguran meliputi penduduk yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan, atau mempersiapkan suatu usaha baru, atau merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan (putus asa), atau sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja. Yang dimaksud mencari pekerjaan adalah upaya yang dilakukan untuk memperoleh pekerjaan pada suatu periode rujukan. Mempersiapkan usaha baru adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang dalam rangka mempersiapkan suatu usaha yang 'baru', yang bertujuan untuk memperoleh penghasilan/keuntungan atas risiko sendiri, baik dengan atau tanpa memperkerjakan buruh/karyawan/pegawai dibayar maupun tak dibayar. Mempersiapkan suatu usaha yang dimaksud adalah apabila 'tindakannya nyata', seperti mengumpulkan modal atau perlengkapan/alat, mencari lokasi/tempat, mengurus surat izin usaha, dan sebagainya, baik telah maupun sedang dilakukan. Merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (putus asa) adalah alasan bagi mereka yang berkali-kali mencari pekerjaan tetapi tidak berhasil mendapatkan pekerjaan, sehingga ia merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan yang diinginkan. Atau mereka yang merasa karena keadaan situasi/kondisi/iklim/musim menyebabkan tidak mungkin mendapatkan pekerjaan yang diinginkan. Sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja adalah alasan bagi mereka tidak mencari pekerjaan/ mempersiapkan usaha karena sudah diterima bekerja, tapi pada saat pencacahan belum mulai bekerja.

Periode referensi merupakan periode waktu yang ditetapkan untuk membatasi keterangan responden. Dalam survei rumah tangga atau individu, periode referensi yang pendek (*a short recent reference period*) akan meminimumkan kesalahan responden dalam mengingat (*recall*) dan juga mengurangi masalah (statistik) yang timbul oleh karena perpindahan penduduk dan perubahan status aktivitas, pekerjaan, dan karakteristik penduduk lainnya. Standar internasional untuk periode referensi yang pendek adalah satu hari atau satu minggu. Periode referensi satu minggu yang lalu paling banyak diterapkan di negara-negara yang melaksanakan survei angkatan kerja nasional, termasuk Indonesia.

Selain periode referensi seminggu yang lalu, dalam Sakernas juga dikenal kriteria satu jam. Kriteria satu jam secara berturut-turut digunakan dengan pertimbangan untuk mencakup semua jenis pekerjaan yang mungkin ada pada suatu negara, termasuk di dalamnya adalah pekerjaan dengan waktu singkat (*short-time work*), pekerja bebas, *stand-by work*, dan pekerjaan yang tak beraturan lainnya. Kriteria satu jam juga dikaitkan dengan definisi bekerja dan penganggur yang digunakan, di mana penganggur adalah situasi dari ketiadaan pekerjaan secara total (*lack of work*), dimana apabila batas minimum dari jumlah jam kerja dinaikkan, maka akan mengubah definisi penganggur, yaitu bukan lagi ketiadaan pekerjaan secara total.

Di samping itu, juga untuk memastikan bahwa pada suatu tingkat agregasi tertentu, input tenaga kerja total berkaitan langsung dengan produksi total. Hal ini diperlukan, terutama ketika dilakukan analisis gabungan antara statistik ketenagakerjaan dan statistik produksi.

Berdasarkan argumen teknis, ILO merekomendasikan untuk memperhatikan *the one hour criterion*, yaitu digunakannya konsep/definisi satu jam dalam periode referensi tertentu untuk menentukan seseorang dikategorikan sebagai bekerja (*employed*).

BPS menggunakan konsep/definisi “bekerja paling sedikit 1 jam secara berturut-turut dalam seminggu yang lalu” untuk mengkategorikan seseorang sebagai bekerja (*currently economically active population*), tanpa melihat lapangan usaha, jabatan, maupun status pekerjaannya.

INDIKATOR PASAR TENAGA KERJA

Organisasi Perburuhan Internasional (*International Labour Organization-ILO*) meluncurkan *Key Indicator of Labour Market* (KILM) pada tahun 1999, untuk melengkapi program pengumpulan data secara rutin dan untuk meningkatkan penyebaran data pada elemen kunci dari pasar tenaga kerja dunia.

Terdapat 20 (dua puluh) indikator yang disusun oleh ILO, yang dikelompokkan ke dalam 8 (delapan) kelompok, yaitu:

1. Partisipasi di dunia kerja, yang terdiri dari KILM 1, yaitu Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja;
2. Indikator penduduk yang bekerja, terdiri dari KILM 2 (Rasio Penduduk yang Bekerja Terhadap Jumlah Penduduk), KILM 3 (Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama), KILM 4 (Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha), KILM 5 (Pekerja Paruh Waktu), KILM 6 (Penduduk yang Bekerja Menurut Jam Kerja), dan KILM 7 (Penduduk yang Bekerja di Sektor Informal);
3. Indikator pengangguran, *underemployment* (setengah penganggur), dan ketidakaktifan, yang terdiri dari KILM 8 (Pengangguran), KILM 9 (Pengangguran pada Kelompok Umur Muda), KILM 10 (Pengangguran Jangka Panjang), KILM 11 (Pengangguran dan Pendidikan), KILM 12 (Setengah Penganggur/*underemployment*), dan KILM 13 (Tingkat Ketidakaktifan);
4. Indikator pendidikan dan melek huruf, yang terdiri dari KILM 14 (Pencapaian Pendidikan dan Melek Huruf);
5. Indikator upah dan biaya tenaga kerja, yang terdiri dari KILM 15 (Indeks Upah Sektor Manufaktur), KILM 16 (Indikator Upah dan Pendapatan Berdasarkan Jabatan), dan KILM 17 (Upah per Jam);
6. Produktivitas Tenaga Kerja yang termuat dalam KILM 18 (Produktivitas Tenaga Kerja);
7. Indikator elastisitas tenaga kerja yang termuat dalam KILM 19 (Elastisitas Tenaga Kerja);
8. Indikator kemiskinan, pekerja miskin, dan distribusi pendapatan yang tertuang dalam KILM 20 (Indikator Kemiskinan, Penduduk Bekerja yang Miskin, dan Distribusi Pendapatan).

KILM 1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah ukuran proporsi penduduk umur kerja yang terlibat aktif di pasar tenaga kerja, baik dengan bekerja atau mencari pekerjaan, yang memberikan indikasi ukuran relatif dari pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk terlibat dalam produksi barang dan jasa. Rincian angkatan kerja menurut jenis kelamin dan kelompok umur memberikan profil distribusi penduduk yang aktif secara ekonomi. Secara umum, kegunaan indikator ini adalah untuk mengindikasikan besarnya penduduk umur kerja (15 tahun ke atas) yang aktif secara ekonomi di suatu negara atau wilayah, dan menunjukkan besaran relatif dan pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk produksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. TPAK diukur sebagai persentase jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk umur kerja.

Tabel publikasi standar yang dikeluarkan ILO (*KILM 6th ed*) menyajikan estimasi tingkat partisipasi angkatan kerja menurut jenis kelamin dan kelompok umur, dengan standar sebagai berikut: 15+, 15–24, 15–64, 25–54, 25–34, 35–54, 55–64, dan 65 tahun ke atas. Penggunaan kelompok umur ini digunakan di lebih dari 190 negara selama tahun 1980 sampai 2010.

KILM 2. Rasio Penduduk yang Bekerja Terhadap Jumlah Penduduk (*Employment to Population Ratio-EPR*)

Rasio penduduk yang bekerja terhadap jumlah penduduk (*Employment to Population Ratio-EPR*) didefinisikan sebagai proporsi penduduk umur kerja suatu negara yang berstatus bekerja terhadap penduduk umur kerja. Rasio yang tinggi berarti sebagian besar penduduk suatu negara adalah bekerja, sementara rasio rendah berarti bahwa sebagian besar penduduk tidak terlibat langsung dalam kegiatan yang berhubungan dengan pasar, karena mereka menganggur atau (lebih mungkin) tidak termasuk dalam angkatan kerja, yang sering disebut sebagai Bukan Angkatan Kerja (BAK).

Rasio ini memberikan informasi tentang kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja, karena di banyak negara indikator ini menghasilkan analisis yang lebih mendalam dibandingkan dengan tingkat pengangguran. Meskipun secara keseluruhan rasio tinggi biasanya dianggap sebagai positif, indikator ini saja tidak cukup untuk menilai tingkat pekerjaan yang layak atau

tingkat defisit pekerjaan yang layak. Indikator tambahan diperlukan untuk menilai isu-isu seperti upah/gaji, jam kerja, lapangan kerja sektor informal, setengah pengangguran, dan kondisi kerja. Bahkan, nilai rasio ini bisa tinggi untuk alasan yang tidak selalu positif misalnya, pilihan pendidikan yang terbatas sehingga kaum muda mengambil pekerjaan yang tersedia daripada tinggal di sekolah untuk membangun sumber daya mereka (memilih bekerja demi melanjutkan sekolah/membiayai sekolah). Untuk alasan ini, sangat disarankan bahwa indikator ini harus ditinjau ulang secara kolektif dalam setiap evaluasi kebijakan tenaga kerja di suatu negara/wilayah.

KILM 3. Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama

Kategorisasi menurut status pekerjaan utama dapat membantu dalam memahami dinamika pasar tenaga kerja dan tingkat pembangunan suatu negara. Selama bertahun-tahun, dan dengan kemajuan pembangunan, suatu negara biasanya akan mengharapkan untuk dapat melihat pergeseran pekerjaan dari sektor pertanian ke sektor industri dan jasa, dengan peningkatan pada jumlah penduduk bekerja yang digaji (buruh/karyawan/pegawai) dan penurunan jumlah pekerja keluarga yang sebelumnya berkontribusi/bekerja di sektor pertanian.

Status pekerjaan adalah kedudukan seseorang dalam melakukan pekerjaan di suatu unit usaha/kegiatan. Informasi mengenai status dalam pekerjaan utama yang dikumpulkan dalam Sakernas adalah:

1. Berusaha sendiri;
2. Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tak dibayar;
3. Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar;
4. Buruh/karyawan/pegawai;
5. Pekerja bebas di pertanian;
6. Pekerja bebas di nonpertanian;
7. Pekerja keluarga/tak dibayar.

Dalam publikasi ini, pengelompokan status dalam pekerjaan utama adalah sebagai berikut:

- 1) Penduduk yang bekerja dengan upah/gaji adalah penduduk bekerja dengan status pekerjaan buruh/karyawan/pegawai;
- 2) Penduduk yang bekerja dengan status berusaha, terdiri dari :

- a. Pengusaha, yaitu penduduk bekerja dengan status pekerjaan berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar;
 - b. Berusaha sendiri dan berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar;
 - c. Pekerja bebas yang terdiri dari pekerja bebas di pertanian dan non pertanian;
- 3) Pekerja keluarga atau pekerja tak dibayar.

Selain itu, disajikan juga persentase pekerja rentan (*vulnerable employment*) terhadap total penduduk bekerja. Konsep pekerja rentan mengacu pada publikasi KILM-ILO, yaitu penduduk bekerja dengan status dalam pekerjaan utama adalah berusaha sendiri, pekerja bebas baik di pertanian dan nonpertanian, serta pekerja keluarga atau pekerja tak dibayar.

KILM 4. Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha

Informasi sektoral biasanya berguna untuk mengidentifikasi pergeseran yang besar dalam ketenagakerjaan dan tingkat pem-bangunan. Dalam buku teks pembangunan ekonomi, tenaga kerja bergeser dari pertanian dan aktivitas tenaga kerja intensif lainnya ke sektor industri dan akhirnya menuju ke sektor jasa-jasa, dalam prosesnya, penduduk yang bekerja berpindah dari desa ke kota.

Klasifikasi baku yang digunakan dalam penggolongan lapangan pekerjaan/lapangan usaha adalah Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2009. Untuk kepentingan penyajian/publikasi, digunakan kategori/sektor sebagai berikut:

- 1) Pertanian, kehutanan, perburuan, dan perikanan;
- 2) Pertambangan dan penggalian;
- 3) Industri pengolahan;
- 4) Listrik, gas, dan air;
- 5) Bangunan;
- 6) Perdagangan besar, eceran, rumah makan, dan hotel;
- 7) Transportasi, pergudangan, dan komuni-kasi;
- 8) Keuangan, asuransi, usaha persewaan bangunan, tanah, dan jasa perusahaan;
- 9) Jasa kemasyarakatan.

Untuk kepentingan analisis, sektor dalam perekonomian dibagi menjadi 3 (tiga) sektor yaitu: *A (Agriculture)*/Sektor Pertanian, *M (Manufacture)*/Sektor Manufaktur dan *S (Services)*/Sektor Jasa-jasa, berdasarkan pada definisi sektor *International Standard Industrial Classification (ISIC) System* (Revisi 2 dan Revisi 3).

KILM 5. Pekerja Paruh Waktu

Jumlah jam kerja berdampak pada kesehatan dan kesejahteraan orang yang bekerja serta tingkat produktivitas dan biaya tenaga kerja yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Mengukur tingkat dan tren di jam-jam bekerja di masyarakat, untuk berbagai kelompok penduduk bekerja dan untuk penduduk bekerja secara individu, menjadi penting ketika melakukan pemantauan kerja dan kondisi hidup maupun ketika menganalisis perkembangan ekonomi.

Indikator pekerja paruh waktu berfokus pada individu dengan jumlah jam kerja kurang dari pekerjaan penuh-waktu (*full time*), yang merupakan proporsi dari total penduduk yang bekerja. Dalam hal ini, pekerja paruh waktu yang dimaksud adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja penuh-waktu/normal, tetapi tidak mencari pekerjaan atau tidak bersedia menerima pekerjaan lain.

Karena tidak ada definisi yang disepakati secara internasional untuk jumlah minimum jam dalam seminggu yang merupakan pekerjaan penuh-waktu (*full time*), biasanya digunakan batas 35 jam seminggu sebagai jam kerja normal. Beberapa negara yang menggunakan batas 35 jam adalah Republik Korea, Amerika, dan El Salvador¹). Untuk kasus Indonesia, batas yang digunakan adalah kurang dari 35 jam seminggu dan mencari pekerjaan.

KILM 6. Penduduk yang Bekerja Menurut Jam Kerja

KILM ini bertujuan untuk menunjukkan jumlah orang yang dipekerjakan menurut jam bekerja (biasanya atau sebenarnya): kurang dari 25 jam kerja per minggu; antara 25 dan 34 jam; antara 35 dan 39 jam; antara 40 dan 48 jam; antara 49 dan 59 jam; dan 60 jam ke atas, sebagaimana data yang tersedia.

KILM 7. Penduduk yang Bekerja di Sektor Informal

Penduduk yang bekerja di sektor informal terkait perkiraan jumlah orang yang bekerja di sektor informal dibandingkan dengan jumlah orang bekerja.

Dalam hal ukuran dan pertumbuhan, sektor informal merupakan bagian penting dari kehidupan ekonomi, sosial, dan politik di sebagian besar negara berkembang, serta beberapa negara maju. Di negara-negara dengan tingkat pertumbuhan penduduk atau urbanisasi yang tinggi, ekonomi informal cenderung tumbuh untuk menyerap sebagian besar tenaga kerja. Konferensi Internasional Statistik Tenaga Kerja (*The International Conference of Labour Statisticians-ICLS*) ke-15 mendefinisikan sektor informal sebagai unit produksi dalam usaha rumah tangga yang dimiliki oleh rumah tangga. Mereka yang bekerja di sektor informal terdiri semua orang yang selama periode acuan tertentu yang bekerja pada setidaknya satu unit produksi yang memenuhi konsep sektor informal, terlepas dari status mereka dalam pekerjaan dan apakah itu pekerjaan utama atau pekerjaan sekunder. Resolusi ICLS memperbolehkan beberapa variasi konsep nasional. Akibatnya, informasi untuk indikator ini sering didasarkan pada definisi nasional dan pengukuran ekonomi informal.

Selain itu, pekerjaan informal dicirikan oleh ketiadaan kontrak, perlindungan sosial, hak untuk berbagai jaminan dan tidak tunduk pada undang-undang tenaga kerja dan pendapatan pajak, yang mungkin tidak sepenuhnya tertangkap dengan fokus hanya pada pekerjaan di sektor informal.

ICLS ke-17 mendefinisikan pekerja sektor informal sebagai "karyawan dengan hubungan kerja yang tidak tercakup dalam perundang-undangan atau dalam praktiknya, tidak tunduk pada undang-undang tenaga kerja, pajak, pendapatan, perlindungan sosial atau hak tertentu untuk jaminan kerja tertentu (pemberitahuan pemecatan sebelumnya, pembayaran yang buruk, dibayar tahunan atau izin sakit, dll)". Perlu diketahui bahwa definisi ini dibuat untuk tingkat pekerjaan dan bukan untuk perorangan karena setiap orang dapat secara bersamaan memiliki dua pekerjaan atau lebih.

Pekerjaan informal dapat diklasifikasikan lebih lanjut menjadi dua: usaha sendiri informal dan pekerjaan upahan informal yang mencakup karyawan tanpa kontrak resmi, jaminan pekerja atau perlindungan sosial yang dipekerjakan di usaha formal atau informal. Yang termasuk usaha sendiri informal adalah pengusaha pada sektor informal, berusaha sendiri pada usaha informal, pekerja keluarga tidak dibayar dan anggota koperasi produksi informal (Chen, 2006 seperti dikutip dalam Maligalig, dkk, 2008). Pembedaan ini menyarankan agar

pekerja informal dibagi dalam seluruh kategori status pekerja: pengusaha, buruh, berusaha sendiri, pekerja keluarga tidak dibayar dan anggota koperasi produksi.

BPS melakukan pendekatan khusus dalam menentukan penduduk yang bekerja di sektor formal/informal, yaitu berdasarkan status dalam pekerjaan utama dan jenis pekerjaan/jabatan.

KILM 8. Pengangguran

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) atau biasanya disebut sebagai tingkat pengangguran menggambarkan proporsi angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif mencari dan bersedia untuk bekerja. Ini tidak boleh disalahartikan sebagai kesulitan ekonomi, meskipun korelasi antara tingkat pengangguran dan kemiskinan sering ada dan cenderung memiliki korelasi negatif. Definisi baku untuk penganggur adalah mereka yang tidak mempunyai pekerjaan, sedang mencari pekerjaan, dan bersedia untuk bekerja.

Bersama dengan rasio penduduk bekerja terhadap jumlah penduduk (KILM 2), tingkat pengangguran menyediakan indikator situasi pasar tenaga kerja di negara-negara yang mengumpulkan informasi tentang tenaga kerja.

Secara spesifik, penganggur terbuka dalam Sakernas, terdiri atas:

- 1) Mereka yang tidak bekerja dan mencari pekerjaan;
- 2) Mereka yang tidak bekerja dan mempersiapkan usaha;
- 3) Mereka yang tidak bekerja, dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan;
- 4) Mereka yang tidak bekerja, dan tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja, tetapi belum mulai bekerja.

Tingkat pengangguran oleh banyak negara digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan. Jika bekerja diartikan sebagai situasi yang diinginkan bagi orang-orang dalam populasi yang secara ekonomi aktif (angkatan kerja), maka pengangguran menjadi situasi yang tidak diinginkan. Namun ada kalanya pengangguran jangka pendek menjadi suatu kondisi yang diinginkan dan diperlukan untuk memastikan penyesuaian (*adjustment*) terhadap fluktuasi ekonomi. Tingkat pengangguran pada kelompok tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan umur, jenis kelamin, dan pendidikan

berguna dalam mengidentifikasi kelompok penduduk bekerja dan sektor-sektor yang paling rentan terhadap pengangguran.

Sementara tingkat pengangguran tenaga kerja, dapat dianggap sebagai indikator yang paling informatif yang mencerminkan indikasi pasar umum dan kinerja pasar tenaga kerja dan ekonomi secara keseluruhan, tidak harus ditafsirkan sebagai ukuran kesulitan ekonomi atau kesejahteraan. Bila didasarkan pada standar internasional yang direkomendasikan, tingkat pengangguran hanya memberikan gambaran proporsi angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan tapi bersedia dan secara aktif mencari pekerjaan. Angka ini menggambarkan tentang sumber daya ekonomi penganggur atau anggota keluarga mereka. Penggunaannya harus dibatasi sebagai ukuran pemanfaatan tenaga kerja serta indikasi kegagalan untuk mencari pekerjaan. Tindakan-tindakan lain, termasuk indikator pendapatan yang terkait, akan diperlukan untuk mengevaluasi kesulitan ekonomi.

Tingkat pengangguran secara matematis didefinisikan sebagai hasil bagi dari jumlah pengangguran (untuk negara atau kelompok penduduk bekerja tertentu) dengan jumlah angkatan kerja. Harus ditekankan bahwa denominator/faktor pembagi yang berfungsi sebagai dasar statistik ini adalah tenaga kerja atau penduduk yang aktif secara ekonomi, *bukan* jumlah penduduk. Perbedaan ini tidak selalu dipahami oleh publik. Memang, istilah "angkatan kerja" dan "bekerja" kadang-kadang keliru digunakan secara bergantian. Misalnya, tingkat pengangguran adalah 6 persen, maka dapat dikatakan bahwa terdapat 6 persen dari penduduk yang aktif secara ekonomi (angkatan kerja) yang saat ini sedang tidak bekerja dan mencari pekerjaan atau bersedia bekerja.

KILM 9. Pengangguran pada Kelompok Umur Muda

Tingkat pengangguran penduduk umur muda memberikan gambaran kepada kita mengenai proporsi angkatan kerja pada kelompok umur muda dengan kondisi: (a) tidak memiliki pekerjaan, (b) secara aktif mencari pekerjaan, dan (c) tersedia untuk bekerja dalam pasar tenaga kerja. Penduduk umur muda yang menganggur merupakan salah satu masalah yang memerlukan penanganan kebijakan khusus yang penting bagi banyak negara, terlepas dari tahap pembangunan. Untuk tujuan indikator ini, istilah "umur muda" mencakup orang

yang berumur 15 sampai 24 tahun, sedangkan "orang dewasa" didefinisikan sebagai orang yang berumur 25 tahun ke atas.

KILM 10. Pengangguran Jangka Panjang

Pengangguran jangka panjang merupakan stok tenaga kerja yang tidak dapat dimanfaatkan, merupakan bagian dari angkatan kerja, tetapi tidak memiliki pekerjaan (menganggur) dalam jangka waktu tertentu. Sayangnya, Sakernas tidak mengumpulkan informasi mengenai berapa lama seseorang menganggur. Indikator ini tidak dapat disajikan karena keterbatasan variabel yang dikumpulkan dalam Sakernas.

KILM 11. Pengangguran dan Pendidikan

Indikator ini melihat hubungan antara pencapaian pendidikan penduduk bekerja dan pengangguran yang memberikan gambaran mengenai perubahan dalam permintaan tenaga kerja. Informasi mengenai tingkat pengangguran berdasarkan pendidikan memiliki implikasi penting bagi penduduk bekerja dan kebijakan pendidikan. Jika diketahui bahwa orang dengan tingkat pendidikan yang rendah memiliki risiko yang lebih tinggi menjadi pengangguran, kebijakan yang mungkin diambil adalah meningkatkan tingkat pendidikan mereka atau menciptakan lebih banyak pekerjaan dengan keterampilan rendah (*low skilled job*) di dalam negeri. Di sisi lain, komposisi pengangguran yang lebih tinggi di kalangan orang-orang dengan pendidikan tinggi bisa menunjukkan kurangnya pekerjaan teknis yang profesional dan tingkat tinggi. Tabel yang biasanya disajikan menunjukkan distribusi persentase dari total pengangguran suatu negara sesuai dengan lima tingkat sekolah, tingkat pra-dasar, kurang dari satu tahun, tingkat dasar, tingkat menengah, dan tingkat tersier (dalam publikasi ini hanya dikategorikan dalam empat tingkat sekolah). Sebagai catatan, angka yang ditampilkan bisa berupa distribusi dan bisa berupa *rate*.

KILM12. Setengah Penganggur (*Underemployment*)

Mereka yang dikategorikan dalam setengah penganggur adalah mereka yang jumlah jam kerjanya di bawah ambang batas jam kerja normal (bekerja kurang dari 35 jam dalam seminggu yang lalu), dengan kondisi:

1) Mereka yang dengan sukarela mencari pekerjaan tambahan, meliputi:

- a. Mereka yang menginginkan pekerjaan lain untuk menambah jam kerjanya dari pekerjaannya yang sekarang;
 - b. Mereka yang menginginkan mendapat ganti dari pekerjaannya yang sekarang dengan pekerjaan lain yang mempunyai jam kerja lebih banyak.
- 2) Mereka yang bersedia menerima pekerjaan tambahan.

KILM 13. Tingkat Ketidakaktifan

Tingkat ketidakaktifan adalah ukuran proporsi penduduk umur kerja suatu negara yang tidak terlibat aktif dalam pasar tenaga kerja, baik dengan bekerja atau mencari pekerjaan (bukan angkatan kerja). Tingkat ketidakaktifan ini jika dijumlahkan dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK-lihat KILM 1) maka hasilnya adalah 100 persen, dengan perkataan lain tingkat ketidakaktifan sama dengan 1 (satu) dikurang TPAK ($1-TPAK$).

Dalam beberapa situasi, tingkat ketidakaktifan tinggi untuk kelompok populasi tertentu tidak harus selalu dilihat sebagai suatu kondisi "buruk", misalnya tingkat ketidakaktifan yang relatif tinggi untuk wanita umur 25–34 tahun mungkin karena mereka meninggalkan pasar kerja untuk mengurus keluarga dan melaksanakan tanggung jawab seperti melahirkan dan mengasuh anak. Dengan menggunakan data dalam KILM 13, pengguna dapat melihat sejauh mana ibu berkaitan dengan pola tenaga kerja perempuan. Telah lama diakui bahwa aspek-aspek struktur rumah tangga terkait dengan aktivitas pasar tenaga kerja, misalnya kepala rumah tangga perempuan cenderung memiliki tingkat ketidakaktifan yang relatif rendah. Pada pasangan yang menikah, suami biasanya memiliki tingkat ketidakaktifan yang rendah, terutama jika ada anak-anak dalam keluarga. Tingkat ketidakaktifan yang rendah pada wanita bisa berkorelasi dengan tingginya tingkat ketidakaktifan untuk laki-laki, yaitu suami, jika laki-laki sedang menyelesaikan pendidikan atau secara fisik tidak mampu bekerja, sehingga membuat istri sebagai pencari nafkah utama.

KILM 14. Pencapaian Pendidikan dan Melek Huruf

Informasi tentang tingkat pencapaian pendidikan saat ini adalah indikator terbaik yang tersedia untuk melihat tingkat keahlian tenaga kerja. Pendidikan merupakan salah satu faktor penentu penting untuk menilai kemampuan suatu negara untuk bersaing dengan sukses di pasar dunia dan membuat efisiensi

penggunaan kemajuan teknologi yang cepat. Tabel KILM 14 menyajikan informasi mengenai tingkat pendidikan angkatan kerja dengan lima tingkat pendidikan, yaitu tidak pernah bersekolah, tingkat pra-dasar, tingkat dasar, tingkat menengah, dan tingkat tinggi (dalam publikasi ini hanya dikategorikan dalam tiga tingkat pendidikan, yaitu tingkat pendidikan dasar ke bawah, tingkat menengah, dan tingkat tinggi).

Disamping itu, disajikan pula pencapaian pendidikan angkatan kerja menurut kelompok umur sebagai berikut: umur muda (15-24 tahun) dan "dewasa" yang didefinisikan sebagai orang yang berumur 25 tahun ke atas.

KILM 15. Indeks Upah Sektor Manufaktur

Sektor manufaktur yang dikenal sebagai sektor formal dapat memberikan gambaran mengenai tingkat kesejahteraan penduduk bekerja melalui indeks upah pada sektor ini. Tetapi, terdapat survei khusus (Survei Upah dan Survei Struktur Upah) yang bukan merupakan bagian dari Sakernas yang dilakukan untuk mengumpulkan data terkait dengan indikator ini. Oleh karena itu, indikator ini tidak dapat disajikan pada publikasi KILM ini.

KILM 16. Indikator Upah dan Pendapatan Berdasarkan Jabatan

Salah satu keterbatasan variabel pada Sakernas adalah hanya menanyakan upah/ pendapatan pada status pekerjaan tertentu. Akibatnya, tidak semua penduduk bekerja mempunyai informasi pendapatan/upah. Oleh karena itu, indikator ini juga tidak dapat disajikan pada publikasi ini.

KILM 17. Upah per Jam

Seperti KILM 15 dan 16 mengenai informasi upah, Sakernas tidak memiliki informasi upah per jam. Tidak adanya pertanyaan mengenai informasi upah per jam dikarenakan kebanyakan di Indonesia, orang yang bekerja tidak dibayar berdasarkan jam kerja, tetapi hari kerja. Hanya sedikit sekali lapangan pekerjaan yang membayar orang yang bekerja berdasarkan hitungan jam. Selain itu, dalam Sakernas yang ditanyakan adalah pendapatan sebulan terakhir, sementara untuk jam kerja, ditanyakan jumlah jam kerja seminggu terakhir. Estimasi upah kerja per jam akan sangat berisiko menimbulkan bias statistik. Oleh karena itu, indikator ini tidak dipublikasikan pada publikasi KILM ini.

KILM 18. Produktivitas Tenaga Kerja

Tingkat produktivitas tenaga kerja merupakan ukuran penting untuk melihat sejauh mana faktor produksi L (*Labour*/Tenaga Kerja) berperan dalam proses produksi. Tingkat produktivitas tenaga kerja memberikan gambaran mengenai output yang dihasilkan oleh satu unit tenaga kerja. Semakin tinggi output yang dihasilkan, maka semakin produktif tenaga kerja tersebut, demikian sebaliknya. Indikator ini juga penting untuk melihat sektor mana saja yang memiliki tenaga kerja dengan produktivitas tinggi, dan sektor mana yang tidak. Identifikasi ini memberikan gambaran sektor padat karya (*labour intencive*) dan sektor padat modal (*capital intencive*). Akan tetapi karena keterbatasan variabel yang dikumpulkan pada Sakernas mengakibatkan indikator ini tidak dapat disajikan pada publikasi kali ini.

KILM 19. Elastisitas Tenaga Kerja

Tingkat elastisitas tenaga kerja memberikan gambaran mengenai banyaknya tenaga kerja yang terserap pada proses produksi untuk menghasilkan nilai tambah tertentu. Dengan kata lain, elastisitas tenaga kerja adalah banyaknya tenaga kerja terserap setiap peningkatan satu persen pertumbuhan ekonomi. Untuk melakukan analisis ini, diperlukan data nilai tambah (PDB/PDRB). Analisis ini merupakan analisis lintas sektor, sehingga tidak bisa ditampilkan dalam publikasi ini.

KILM 20. Indikator Kemiskinan, Penduduk Bekerja yang Miskin, dan Distribusi Pendapatan

Sebagaimana indikator elastisitas tenaga kerja, indikator kemiskinan, penduduk bekerja yang miskin, dan distribusi pendapatan juga memerlukan beberapa variabel tambahan yang tidak ditanyakan pada Sakernas. Selain itu, data lintas sektor juga penting untuk melengkapi analisis ini. Indikator ini tidak dapat disajikan karena keterbatasan variabel yang dikumpulkan dalam Sakernas.

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

Jl. Soekarno Hatta/Trikora No 7 Banjarbaru

+62 511 6749001 +62 511 6749106

Email: bps6300@bps.go.id

